

ANALISA

1984—5

PENDIDIKAN & BEBERAPA TANTANGANNYA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Dewan Redaksi

Pande Radja SILALAHÍ

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAHÍ
Jusuf WANANDI
Kirdi DIPOYUDO
A. Sudiharto DJIWANDONO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO
Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAHÍ
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang 111/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532 - 35

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta 10160, Telepon 349489

PENGANTAR REDAKSI	330
ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA <i>Daoed JOESOEF</i>	333
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI MENUNJANG PENDIDIKAN NASIONAL <i>SUKANTO</i>	340
UNIVERSITAS TERBUKA: ALTERNATIF BARU PENDIDIKAN TINGGI KITA <i>BABARI</i>	350
KURIKULUM 1984 <i>Dj. SOEKMONO</i>	360
PENDIDIKAN DAN LAPANGAN KERJA: BEBERAPA ASUMSI UMUM <i>Mark BLAUG</i>	372
MAKNA KESEJARAHAN SEBAGAI PENGGERAK PERKEMBANGAN BANGSA <i>Sunarto NDARU MURSITO</i>	381

Pengantar Redaksi

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betapa pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat disangkal, karena hanya bangsa yang cerdaslah yang dapat mengisi kemerdekaannya, dan dapat mencapai tujuannya secara utuh dan lengkap. Para pemimpin masyarakat sebelum kemerdekaan telah menyadari sepenuhnya betapa pentingnya pendidikan bagi setiap warga masyarakat. Kesadaran seperti ini sekarang bukan hanya terbatas pada para pemimpin bangsa tetapi telah menjangkau hampir seluruh masyarakat.

Pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang lalu Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Wajib Belajar sehingga anak usia 7-12 tahun memperoleh kesempatan yang sama dan adil dalam menikmati pendidikan dasar. Gerakan Wajib Belajar ini baru bisa terlaksana setelah 39 tahun merdeka. Waktu yang cukup lama dan sekaligus menunjukkan bahwa dalam hal pendidikan banyak masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan. Masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan tidak selalu berbentuk sama tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan dan/atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan adalah proses belajar-mengajar untuk membantu anak didik menggali, menemui, mempelajari, mengetahui, memahami, menghayati nilai-nilai yang berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam pengertian seperti ini maka dalam usaha mencerdaskan bangsa, dan pengembangan masyarakat, aspek sosial budaya harus mendapat perhatian kalau tidak menjadi pusat perhatian.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu komunikasi juga mengalami perkembangan. Perkembangan ilmu komunikasi telah mempengaruhi proses komunikasi masyarakat dan dengan ditemukan-

nya peralatan atau teknologi komunikasi baru, proses komunikasi mengalami perubahan yang sangat cepat. Pengaruh perkembangan ini tidak dapat diabaikan walaupun oleh karenanya harus dihadapi beberapa masalah termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan demikian menelaah teknologi komunikasi baru secara mendalam untuk menemukan unsur-unsur yang bermanfaat bagi pendidikan nasional adalah merupakan pekerjaan yang besar artinya.

Setiap tahun ajaran baru lembaga pendidikan kita selalu menghadapi masalah kesulitan menampung lulusan SMTA yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Sebagai jawaban terhadap masalah ini pemerintah dalam tahun ini akan melaksanakan program Universitas Terbuka. Bagi Indonesia hal ini merupakan hal yang baru sehingga dianggap pengetahuan mengenai Universitas Terbuka ini sangat penting karena dengan pengetahuan tersebut mungkin akan terlihat beberapa hal yang dapat menunjang dan menyukkseskan kesulitan yang akan dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Berhasil tidaknya pendidikan mencapai sasarannya tergantung kepada bagaimana proses belajar-mengajar berlangsung atau tergantung dari kurikulum yang diberlakukan. Kurikulum yang baik pada suatu kurun waktu tertentu mungkin kurang sesuai dengan kurun waktu tertentu lainnya dan ini tergantung kepada perkembangan dan/atau trend perkembangan masyarakat. Hal ini berarti kurikulum perlu diubah atau dikembangkan sesuai dan selaras dengan perkembangan walaupun tujuan inti atau yang paling hakiki dari pendidikan itu sendiri tidak berubah. Dalam tahun ini juga pemerintah sedang menggodok Kurikulum 1984 sehingga ada baiknya hal ini disoroti sebagai urun rembug guna mendapatkan apa yang diharapkan bersama.

ANALISA Mei 1984 ini bertemakan "Pendidikan dan Beberapa Tantangannya" dengan menurunkan enam buah tulisan. Karangan pertama berjudul "Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia" yang ditulis oleh Daoed JOESOEF. Dalam tulisan ini dikemukakan aspek sosial-budaya dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Karangan kedua berjudul "Pendayagunaan Teknologi Komunikasi Menunjang Pendidikan Nasional," ditulis oleh SUKANTO. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa teknologi komunikasi tidak mengenal batas wilayah, ideologi, agama, bangsa dan suku, bersifat universal. Teknologi komunikasi tidak hanya membawa dampak positif tetapi dengannya teriring dampak negatif. Adanya dampak negatif tidak perlu menyebabkan kita menutup diri terhadap perkembangan teknik komunikasi tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menghindarinya.

Universitas Terbuka sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan masalah keterbatasan daya tampung pendidikan tinggi dalam tahun ini akan

mulai dilaksanakan di Indonesia. Agar Universitas Terbuka tersebut diharapkan dapat mencapai sasarnya, *BABARI* dalam karangannya yang berjudul "Universitas Terbuka: Alternatif Baru Pendidikan Tinggi Kita" memberikan sumbangan pemikirannya melalui pembahasan faktor-faktor yang akan berpengaruh dalam penyelenggaraan Universitas Terbuka.

Bagaimana kurikulum yang sesuai dengan masa sekarang, merupakan pertanyaan yang sering dilontarkan masyarakat. Dalam karangannya yang berjudul "Kurikulum 1984," Dj. SOEKMONO, mencoba menjawab pertanyaan ini sesudah membahas permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang dihadapi di lapangan.

Karangan kelima berjudul, "Pendidikan dan Lapangan Kerja: Beberapa Asumsi Umum," merupakan saduran dari tulisan Mark BLAUG. Dalam karangan ini dikemukakan secara jelas bagaimana hubungan antara pendidikan dengan lapangan kerja dan sejauh mana asumsi yang selama ini dianut dapat dipertanggungjawabkan.

Pendidikan dapat dikatakan berhasil bila mereka yang menerima pendidikan menghayati nilai-nilai yang berguna. Penghayatan nilai-nilai ini akan dapat menggerakkan perkembangan bangsa dan untuk ini mengetahui makna kesejarahan. Hal ini diungkapkan oleh Sunarto NDARU MURSITO dalam tulisannya yang berjudul "Makna Kesejarahan sebagai Penggerak Perkembangan Bangsa." Karangan ini menyoroti prestasi budaya dan ideologi dari segi sejarah dan maknanya bagi pengembangan bangsa.

Mei 1984

REDAKSI

Aspek Sosial-Budaya dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia

Daoed JOESOEUF

Perkataan "pembangunan" selalu bahkan sampai saat ini ditanggapi dalam pengertian pembangunan ekonomi.

Menurut pengertian ekonomi yang murni, "pembangunan" berarti kemampuan suatu ekonomi nasional, yang pada mulanya berada dalam keadaan yang relatif statik, untuk menaikkan pendapatan nasional tahunannya sebesar 3 sampai 7% atau lebih, sambil mengubah struktur produksi dan pekerjaan begitu rupa sehingga bagian-bagiannya yang semakin menurun datang dari sektor pertanian sementara bagian-bagiannya yang semakin meningkat berasal dari sektor-sektor sekunder dan tersier.

Dalam pengertian yang begini arus moneter juga dianggap penting, pengeluaran devisa untuk impor dan pembelanjaan luar negeri lainnya seharusnya tidak terlalu melebihi pemasukan devisa yang disebabkan oleh investasi, pinjaman, bantuan dan penerimaan-penerimaan lainnya. Ada pula ahli ekonomi tertentu yang menitikberatkan pada kesanggupan pemerintah nasional untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara begitu rupa sehingga tidak mengalami defisit dan inflasi dapat dikuasai.

Walaupun pembangunan masyarakat Indonesia tetap memberikan prioritas yang tinggi pada bidang ekonomi dan berhubungan dengan itu penampilannya menjadi persis dan sesuai dengan definisi tersebut di atas, dari semenjak semula kami menggunakan istilah "pembangunan" secara luas sehingga meliputi tujuan-tujuan politik, budaya, sosial maupun ekonomi.

Gagasan cara pembangunan yang juga menghargai nilai-nilai sosial-budaya timbul dari kesadaran tentang betapa piciknya cara pendekatan ekonomi semata-mata. Kekurangan dan kelemahan konsep pembangunan yang

hanya dipusatkan pada ekonomi jelas tercermin pada semakin meningkatnya ketidaklogisan struktural, ketidaksamaan serta kepincangan dan konflik baik dalam kehidupan perorangan, maupun dalam kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, bahkan dalam hubungan internasional.

Berhubung dengan itu ukuran-ukuran ekonomi baru mempunyai arti hanya bila ia ditinjau bersama-sama indikator-indikator lainnya sebagai komponen dari suatu rangkaian yang menggambarkan suatu kecenderungan. Indikator-indikator pembangunan lainnya yang sosio-budaya non-ekonomik itu adalah antara lain: jumlah melek huruf, persekolahan dan perpustakaan, kondisi dan pelayanan kesehatan, perumahan dan sebagainya.

Dalam rangka pemikiran pembangunan seperti itu, jawaban yang paling tepat terhadap semua kebutuhan sosial-budaya tersebut kiranya berupa pengaitan pendidikan dengan kebudayaan, di satu pihak, dan dengan pembangunan, di lain pihak. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan tersebut seharusnya berupa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan dan bukan sebaliknya.

Bila demikian kebudayaan ditanggapi tidak hanya dalam artian seni ruangan (arsitektur, patung, lukisan dan lain-lain), seni waktu (musik, tari, teater, film dan lain-lain), ekspresi plastik dan literair, maupun seni beladiri, yang khas menggambarkan pandangan hidup tersendiri dari kelompok manusia yang menampilkannya, tetapi juga dalam artian sistem nilai dan gagasan vital yang dikandung oleh dan jelas tercermin pada bentuk-bentuk kesenian tersebut.

Tanggapan yang begini memperlakukan kebudayaan sebagai segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), kemauan (etika) serta perasaan (estetika) manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Maka pendidikan, sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan sarana penerusan nilai-nilai dan gagasan vital yang dihayati. Melalui pendidikan dibangkitkan dan dibina kesadaran nilai dalam diri manusia. Sebab nilailah yang membuat manusia hidup sederhana dengan harkat kemanusiaannya dan yang menyadarkannya tentang kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki dan dihadapinya berhubung nilai itulah yang menuntunnya untuk membedakan inti dari isi, untuk memisahkan beras dari sekam, untuk bebas sepenuhnya karena kebebasan bukanlah fungsi dari ada-tidaknya kesempatan memilih, tetapi tergantung dari ada-tidaknya kemampuan orang itu sendiri untuk mengambil sendiri keputusannya yang pada satu ketika harus dilakukannya.

Jadi pada tingkat terakhir pendidikan nasional Indonesia hendak membentuk manusia seutuhnya, yaitu seorang makhluk yang sadar-nilai, yang mengkaji nilai dan yang mencari nilai. Ketiga kualitas keutuhan manusiawi tersebut secara implisit berarti bahwa proses belajar-mengajar seharusnya membuat anak didik mampu melihat secara kritis nilai-nilai yang diwarisinya sehingga mereka terlatih untuk berperan-serta secara kreatif dalam transformasi nilai-nilai demi perbaikan dan kemajuan kehidupannya sendiri, kehidupan sesama warga serta kehidupan negara dan bangsa.

PENGETAHUAN ILMIAH

Salah satu dari nilai-nilai yang ingin diintegrasikan ke dalam kebudayaan Indonesia dewasa ini adalah pengetahuan ilmiah.

Diketahui benar bahwa kebudayaan tradisional Indonesia mengandung nilai-nilai etik, estetik dan artistik yang sungguh agung, berupa penjelasan kepekaan perasaan dan kesuburan fantasi nenek moyang yang mengubah segala sesuatu menjadi ciptaan keindahan, yang mampu bertanding dengan bangsa mana pun di dunia ini. Namun kita sadar sepenuhnya bahwa di masa yang lalu nenek moyang tidak menghasilkan falsafah abstrak yang berat dan dalam yang dalam dirinya merupakan benih dari nilai-nilai ilmiah dan teknologi. Hal ini merupakan satu kelemahan dalam kebudayaan yang kita warisi dari masa silam dan yang seharusnya kita sempurnakan secepat mungkin.

Bila kebudayaan disimpulkan sebagai cara dan pandangan hidup yang dibangun melalui tumpukan pengalaman historis sesuatu bangsa, bila kebudayaan harus dikaitkan pada usaha modernisasi, pembangunan dan perkembangan bangsa tersebut, maka ilmu pengetahuan serta teknologi yang dilahirkannya harus dijadikan bagian yang integral dari kebudayaan (sistem nilai dan gagasan vital) bangsa yang bersangkutan.

Maka itu semangat ilmiah adalah satu dari nilai-nilai yang harus dikembangkan di kalangan anak-anak melalui pendidikan agar mereka menjadi sadar pengetahuan ilmiah. Lalu sejauh agama mencerminkan dimensi spiritual dari kebudayaan, segi estetikanya meliputi pemakaian teknik dan penggunaan peralatan sebagai jawaban terhadap kebutuhan yang semakin halus, sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing menggambarkan segi intelektual dan fisikal dari kebudayaan.

Pengembangan nilai-nilai ilmiah dan teknologis di kalangan anak didik melalui proses belajar-mengajar ini menunjukkan adanya kaitan fungsional antara pendidikan dan pembangunan masyarakat.

Sama halnya dengan agama, ilmu pengetahuan harus dihayati; lebih-lebih bila pendidikan formal bertujuan membuat anak didik menjadi sadar-pengetahuan ilmiah dan tidak sekedar menjadi pemburu gelar akademik semudah mungkin. Maka demi pertumbuhan kesadaran ilmiah tersebut, di lingkungan sekolah, lebih-lebih di lingkungan lembaga pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan seharusnya diperlukan secara utuh, yaitu tidak hanya sebagai "produk," tetapi juga sebagai "proses" dan sebagai "paradigma etik" (masyarakat).

Ilmu pengetahuan, sebagai produk, adalah pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmiah. Jadi dalam dirinya pengetahuan ilmiah terbatas pada pernyataan-pernyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji ataupun dibantah oleh seseorang. Maka itu satu fakta ilmiah tidak mungkin bersifat orisinal seperti halnya pada sesuatu karya kesenian. Yang mungkin orisinal adalah penemuan fakta ilmiah tersebut dan bahannya fakta ilmiah itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa dianggap penting "timing" dari sesuatu penemuan ataupun sesuatu publikasi.

Bila sekolah menuntun anak didiknya untuk menguasai pengetahuan ilmiah semata-mata dalam artian produk tersebut, selalu ada risiko mereka menganggap ilmu pengetahuan seperti mempunyai suatu kekuatan magis berhubung mereka sendiri tidak turut mengalami proses yang melahirkan ilmu pengetahuan itu. Bagi mereka lalu yang terpenting adalah memiliki obyek modern dari studi ini agar kekuatan magis yang bermanfaat itu dapat dinikmati. Namun persepsi tentang ilmu pengetahuan yang demikian ini sebenarnya sama saja dengan fantasi yang ditimbulkan oleh kegemilangan lahiriah dari gambaran negara-negara industri modern yang terpampang jauh di kaki langit negara-negara terbelakang. Suatu fantasi yang lahir dari hal-hal yang tidak dimiliki dan bukannya lahir dari keadaan yang sebenarnya, yaitu citra yang terbalik dari kenyataan faktual yang ada.

Berdasarkan fantasi seperti itu orang-orang yang berfantasi lalu bertekad mewujudkan sendiri persepsi yang keliru itu tanpa menyadari risiko bahwa dengan berbuat begitu mereka sebenarnya membina diri menjadi "budak-pemuja" gelar akademik dan bukannya menjadi "tuan" dari ilmu pengetahuan.

Maka untuk tidak terjerumus ke dalam alam fantasi para anak didik dibimbing untuk mengenal pengetahuan ilmiah dalam artian proses. Ilmu pengetahuan, sebagai proses, adalah kegiatan sosio-akademik yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alamiah sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang kita kehendaki.

Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisa rasional, obyektif, sejauh mungkin bersifat "impersonal," dari masalah-masalah yang didasarkan pada eksperimen dan data yang dapat ditanggapi (observable data).

Dengan begini anak didik mengenal ilmu pengetahuan atau mendapat pengetahuan ilmiah dengan melakukan sendiri kegiatan ilmiah. Jalan terbaik untuk melenyapkan kemistikan dari ilmu pengetahuan memang dengan mendekatinya tidak dari luar melalui rumus-rumus yang siap pakai atau melalui produk teknologi, tetapi dari dalam melalui semangat yang menjiwai dan menggerakkan proses penemuan ilmiah itu.

PARADIGMA

Demi penguasaan ilmu pengetahuan secara utuh, anak didik perlu sekali menghayatinya pula dalam artian paradigma etik. Pengetahuan ilmiah, sebagai paradigma etik, adalah suatu masyarakat (dunia pergaulan) yang tindak-tanduknya, perilaku dan sikap serta tutur-katanya diatur oleh empat ketentuan, yaitu universalisme, komunalisme, jauh dari kepentingan pribadi (disinterestedness) dan skeptisisme yang teratur.

Universalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan bebas dari warna kulit, ras, keturunan maupun keyakinan keagamaan. Komunalisme berarti pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan milik masyarakat (public knowledge). "Disinterestedness" berarti ilmu pengetahuan bukan propaganda. Skeptisisme yang teratur berarti keinginan untuk mengetahui dan bertanya harus didasarkan pada penalaran dan keteraturan berpikir. Bukankah ada dikatakan bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah pemikiran yang teratur (orderly thinking).

Konsekuensi dari pengetahuan ilmiah sebagai paradigma etik atau sebagai masyarakat ini adalah membina kampus, sebagai lingkungan di mana dilaksanakan pendidikan tinggi, benar-benar menjadi suatu masyarakat ilmiah, yaitu lingkungan yang dapat menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemeliharaan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa datang.

Lingkungan ini dapat berbuat begitu karena hanya penerapan paradigma etik itulah yang memungkinkan suburnya kehidupan semangat ilmiah, sedangkan tanpa semangat ilmiah ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan lahir dan berkembang biak.

Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilahirkannya jelas memberikan sumbangan yang besar bagi keberhasilan jalannya pembangunan nasional, masih saja terdapat orang-orang walaupun tidak menentang secara terbuka sesedikitnya menghambat perkembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan seperti dicurigai atau dikhawatiri. Ada yang tidak senang pada ilmu pengetahuan karena ia dikhawatiri dapat mengganggu iman, merusak kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang ini tidak mengetahui bahwa manusia yang pengetahuan ilmiahnya diperoleh melalui ilmu dalam artian proses justru yang paling menyadari Kemahakuasaan Tuhan, Kehadiran Tuhan di mana-mana di setiap detik. Ada pula yang menentang ilmu pengetahuan dan teknologi seolah-olah kemajuan kedua hal tersebut dapat dibendung. Ada lagi yang menghendaki penafsiran dunia dan kehidupan melalui dua nilai, ilmiah dan humanis, dan dengan demikian mempertegas pemecahan yang telah mengkerdikan ilmu pengetahuan tersebut.

Semua pandangan ini dalam dirinya merupakan permainan solusi yang gemampangan. Namun bukan berarti bahwa ia harus diabaikan begitu saja karena biar bagaimanapun ada pertimbangan yang menjadi dasarnya. Kekeliruan mereka kiranya berupa analisa yang kurang mendalam dan berusaha mencocokkan hasil-hasil akhir yang satu dengan lainnya, sedangkan yang diperlukan adalah penelusuran kembali sampai ke sumber permulaannya.

Saya akui bahwa umat manusia dalam beberapa hal telah menderita karena penerapan ilmiah yang menjadi benar-benar anti-nilai sehingga merusak nilai-nilai lainnya dari kebudayaan. Tetapi mengapa menyalahgunakan ilmu pengetahuan mengenai perbuatan manusia yang menyalahgunakan kekuatan ilmiah? Kekuatan ilmu pengetahuan memang dapat dipakai untuk kebaikan ataupun kehancuran manusia. Yang menentukan untuk apa dan ke arah mana kekuatan itu dipakai bukanlah ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi manusia. Manusialah yang harus dipersalahkan.

PUNYA HAK

Ilmu pengetahuan sebagai suatu unsur sosial-budaya dalam pembangunan mempunyai hak untuk berkembang dan dikembangkan. Ia adalah buah dari kejeniusan makhluk manusia. Ia adalah hasil manusia yang terus-menerus bertanya, berpikir, mencari jawaban yang benar, mencari kebenaran.

Sejarah ilmu pengetahuan acap kali ditulis melalui nama-nama para ilmuwan besar seperti Newton dan Einstein sehingga menimbulkan kesan seolah-

olah kemajuan ilmu pengetahuan sangat tergantung pada perkembangan teori. Kiranya lebih mendekati kenyataan bila dikatakan bahwa kemajuan semua ilmu pengetahuan, baik yang dasar maupun yang terapan, sangat ditentukan oleh perkembangan instrumen-instrumen baru.

Kemajuan astronomi terjadi, misalnya berkat dua penemuan teknologis, yaitu teleskop dan spektroskop, walaupun tidak setiap astronom mengetahui nama penemu (pembuat) kedua peralatan tersebut. Demikian pula halnya dengan biologi dan ilmu medikal.

Kedua pengetahuan ilmiah ini tidak akan semaju sekarang ini andaikata tidak ada mikroskop. Dewasa ini pengetahuan manusia yang luar biasa mengenai struktur dari kompleks protein dan mekanisme dari penerusan keturunan (heredity) karena adanya "X-ray diffraktometer" dan komputer. Ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi selalu saling menunjang dalam perkembangannya masing-masing. Memang salah seorang ilmuwan terkemuka pernah berkata bahwa ilmu pengetahuan lebih banyak berhutang budi pada mesin uap daripada mesin uap terhadap ilmu pengetahuan.

Sebagai bangsa yang sangat maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Jepang bila bersedia dapat banyak membantu remaja Indonesia dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan dan menciptakan sendiri teknologi yang diperlukannya.

Bantuan ini kiranya berupa instrumen yang diperlukan oleh sekolah, laboratorium dan lembaga-lembaga penelitian. Sebab sebagaimana telah diuraikan di atas tadi, untuk mengenal ilmu pengetahuan dalam artian produk saja sudah diperlukan adanya instrumen, apalagi untuk menguasainya dalam artian proses.

Sedangkan pembentukan kampus sebagai masyarakat ilmiah tidak akan lengkap dan sempurna selama ia tidak dilengkapi dengan instrumen yang diperlukan untuk itu.

Pendayagunaan Teknologi Komunikasi Menunjang Pendidikan Nasional

SUKANTO*

PENGANTAR

Seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu komunikasi yang merupakan bagian dari ilmu sosial terapan juga mengalami perkembangan. Perkembangan ilmu komunikasi itu telah mempengaruhi proses komunikasi dalam masyarakat. Dengan ditemukannya instrumen-instrumen atau teknologi komunikasi baru, seperti satelit komunikasi dan komputer, proses komunikasi dalam masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat, sehingga dunia ini terasa kecil dan saling berhubungan.

Seperti teknologi pada umumnya, teknologi komunikasi juga tidak mengenal batas wilayah, ideologi, agama, bangsa dan suku. Karena cakrawala teknologi komunikasi bersifat universal, kita tidak mampu menghindarkan diri dari pengaruhnya. Lagi pula, jika kita terlalu menutup diri, kita akan ditinggalkan oleh kemajuan jaman. Dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 dinyatakan bahwa usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu menelaah teknologi komunikasi baru secara mendalam untuk menemukan unsur-unsur yang bermanfaat bagi pembangunan nasional, khususnya pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan merupakan sarana penerusan nilai-nilai ataupun gagasan-gagasan, sehingga setiap orang mampu berperan serta dalam transformasi nilai-nilai demi perbaikan dan kemajuan kehidupan-

*Staf CSIS.

nya sendiri, kehidupan sesama warga negara, serta kehidupan negara dan bangsa. Ini berarti bahwa pendidikan dapat juga dipandang sebagai keseluruhan proses komunikasi pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai. Karena proses pendidikan dan komunikasi saling berhimpitan, maka seluruh jenis teknologi komunikasi mungkin sekali dapat dimanfaatkan bagi pembangunan pendidikan nasional.

DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Secara umum komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan agar terjadi perubahan pemikiran, sikap dan perilaku komunikan sesuai dengan keinginan komunikator. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, terutama akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan proses komunikasi yang pesat juga membutuhkan sarana dan daya-upaya atau teknologi komunikasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Ini berarti bahwa sarana yang diperlukan tidak terbatas pada alat perlengkapan atau perangkat keras, seperti mesin cetak, buku, surat kabar, radio, telepon, telegram, televisi atau komputer, melainkan juga perangkat lunak, seperti metode-metode untuk menggunakan perangkat keras, dan teknik-teknik untuk menciptakan perangkat lunak. Dengan demikian, teknologi komunikasi mencakup seluruh sarana dan daya-upaya, baik yang tradisional maupun yang maju.

Dalam masyarakat yang masih sederhana, proses komunikasi dalam masyarakat berlangsung secara sederhana dan lebih banyak menggunakan daya telepati atau daya ingatan manusia. Setelah tulisan dan mesin cetak ditemukan, proses komunikasi mengalami perubahan dan perkembangan. Kemudian, penemuan radio, telepon, telegram, televisi dan peralatan komunikasi lainnya semakin mempercepat perkembangan proses komunikasi. Lebih-lebih dengan ditemukannya teknologi satelit komunikasi dan komputer, proses komunikasi berlangsung secara universal dan personal sekaligus. Menurut Alvin Toffler, mulai tahun 1970-an umat manusia memasuki peradaban gelombang ketiga, yang merupakan sintesa dari peradaban gelombang pertama dan kedua. Gelombang peradaban ketiga terutama disebabkan oleh pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan proses data yang memungkinkan manusia melihat semua faktor saling berkaitan sebagai suatu kesatuan. Jika peradaban gelombang pertama masih tergantung pada energi yang disimpan oleh alam dan peradaban gelombang kedua lebih mengutamakan pelipatgandaan kekuatan fisik manusia, maka peradaban gelombang ketiga lebih mengutamakan pelipatgandaan kekuatan otak manusia.¹

¹Lihat Alvin Toffler, *The Third Wave* (New York: William Morrow & Company, 1980).

Kemajuan teknologi komunikasi itu ternyata telah terjadi di negara kita juga. Sejak dilancarkannya pembangunan nasional, beberapa jenis teknologi komunikasi yang telah menunjukkan manfaatnya di negara lain secara sengaja dimasukkan guna menunjang pembangunan nasional. Dalam dasawarsa terakhir ini, terutama setelah pengoperasian satelit Palapa dalam tahun 1976, teknologi komunikasi maju di negara kita mengalami perkembangan yang sangat pesat. Misalnya, jumlah stasiun pemancar televisi meningkat dari 82 buah dalam tahun 1978/1979, menjadi 186 buah dalam tahun 1982/1983. Jumlah pesawat televisi yang terdaftar meningkat dari 1,1 juta buah dalam tahun 1978/1979, menjadi 2,9 juta buah dalam tahun 1982/1983. Jumlah kantor pos meningkat dari 562 buah dalam tahun 1978/1979 menjadi 1.076 buah dalam tahun 1982/1983. Dan jumlah kapasitas sambungan telepon baru meningkat dari sekitar 476 ribu dalam tahun 1978/1979 menjadi sekitar 632,6 ribu dalam tahun 1982/1983 (lihat Tabel 1).

Tabel 1

JUMLAH PEMANCAR RADIO, TELEVISI, POS DAN TELEPON, 1978-1983

Jenis	1978/1979	1982/1983	Kenaikan (%)
1. Stasiun pemancar RRI	252	300	19,04
2. Stasiun pemancar TVRI	82	186	126
3. Pesawat televisi terdaftar	1.100.000	2.971.890	170
4. Televisi umum	7.866	29.866	279
5. Kantor pos	562	1.076	96,45
6. Kapasitas sambungan telepon	476.092	632.662	32,88

Sumber: RI, *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus 1983*.

Namun perkembangan beberapa unsur teknologi komunikasi itu tampaknya belum mendapat penghargaan masyarakat secara luas. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan siaran radio, menonton siaran televisi dan membaca surat kabar relatif sangat sedikit (lihat Tabel 2). Bahkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pers dan Pendapat Umum Pusat, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin dan PT Inscore Indonesia memberi kesan bahwa acara-acara pendidikan dan ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian bila dibandingkan dengan acara-acara hiburan.¹ Keadaan ini mungkin karena jum-

¹Lihat Deppen, *Himpunan Ringkasan Hasil Penelitian Penerangan 1978-1980*, hal. 1-73.

lah jam siaran untuk acara pendidikan lebih sedikit daripada siaran untuk hiburan, sehingga acara hiburan itu dimanfaatkan sepenuhnya sebagai rekreasi. Data dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1983 menyebutkan bahwa sejak 1978 hingga 1983 jumlah jam siaran rata-rata per hari untuk acara kebudayaan dan hiburan dari seluruh pemancar RRI dan TVRI sekitar 45-50%, sedangkan untuk acara pendidikan dan agama hanya sekitar 20-23%. Di samping itu, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih rendah mungkin menyebabkan mereka belum dapat menangkap dan memanfaatkan isi siaran dalam acara pendidikan (lihat Tabel 3).

Tabel 2

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN DAN LEBIH
YANG MENDENGARKAN RADIO, MENONTON TELEVISI SERTA
MEMBACA SURAT KABAR DAN MAJALAH

Jenis Kegiatan	1976	1978	Kenaikan
1. Mendengarkan radio	39,8	49,6	9,8
2. Menonton televisi	5,5	19,9	14,4
3. Membaca surat kabar/majalah	7,4	17,0	9,6

Sumber: BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat* 1982, hal. 95.

Tabel 3

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Pendidikan yang Ditamatkan	1971	1978	1980	Kenaikan 1971-1980
1. Tidak sekolah	40,39	28,56	27,56	-12,83
2. Belum tamat SD	33,25	40,85	40,99	7,74
3. SD	19,59	21,64	20,64	1,05
4. SMTP	4,39	5,61	5,98	1,59
5. SMTA	2,04	3,05	4,35	2,31
6. Akademi	0,18	0,29	0,26	0,08
7. Perguruan tinggi	0,16	—	0,22	0,06

Sumber: BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat* 1982, hal. 82.

Data dalam beberapa tabel tersebut juga memberi kesan bahwa kemajuan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat itu ternyata belum sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia dan penyebarannya juga belum merata. Data BPS menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki radio kaset dan televisi di daerah pedesaan lebih kecil daripada di daerah perkotaan (lihat Tabel 4). Dari jumlah kapasitas sambungan telepon sebanyak 632,6 ribu dalam tahun 1982/1983, para pemakainya diperkirakan masih terbatas di daerah perkotaan. Dan, jika kemampuan memiliki pesawat radio dan televisi yang relatif murah masih kecil dan belum merata, maka dapat diperkirakan bahwa kemampuan masyarakat untuk memiliki pesawat video dan komputer yang relatif mahal juga sangat kecil dan tidak merata.

Tabel 4

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI RADIO KASET
DAN TELEVISI DALAM TAHUN 1980

Daerah	Radio Kaset	Televisi
1. Kota	57,90	33,45
2. Pedesaan	36,37	3,79
3. Kota + Pedesaan	40,75	9,82
4. Perbedaan Kota dan Pedesaan	21,53	29,66

Sumber: BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 1982*, hal. 98.

Dari uraian di depan terlihat bahwa teknologi komunikasi di Indonesia telah menjangkau seluruh pelosok tanah air, sehingga antara daerah yang satu dan lainnya cenderung saling berhubungan dan saling bergantung. Namun, kesalingtergantungan itu tidak seimbang, yaitu ketimpangan dalam pemilikan dan pemakaian jenis-jenis teknologi komunikasi. Ketimpangan dalam pemilikan ataupun pemakaian teknologi komunikasi itu dapat mengakibatkan ketimpangan pengetahuan, termasuk ketimpangan informasi. Sejarah telah menunjukkan bahwa penjajahan terhadap negara-negara lain diawali dengan penguasaan bidang pengetahuan dan informasi. Oleh karena itu, perlu diciptakan kebijaksanaan komunikasi yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat informasi.¹ Dengan semakin meratanya pemilikan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam masyarakat, diharapkan setiap warga masyarakat mampu mengambil sendiri keputusan yang pada suatu ketika harus dilakukannya.

¹Lihat Rufinus Lahur, "Masalah-masalah dan Perspektif Kebijakan Komunikasi," *Analisa*, Tahun XII, No. 1, Januari 1983, hal. 44.

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI UNTUK MEMACU PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Beberapa dampak negatif sering menimbulkan kecurigaan orang, bahkan ada yang mengkambinghitamkan teknologi komunikasi sebagai penyebab merosotnya kebudayaan dan kepribadian bangsa. Kecurigaan seperti ini mungkin berdasarkan analisa yang kurang mendalam, dalam hal mana hal-hal negatif lebih ditonjolkan daripada hal-hal positif. Penerapan teknologi komunikasi memang bisa menimbulkan efek negatif, seperti ketimpangan informasi, kejahatan yang meniru cara-cara dalam suatu cerita film, perbuatan asusila akibat rangsangan kaset video porno dan perjudian dengan menggunakan video-game. Seperti ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya, teknologi komunikasi juga dapat dipergunakan untuk kebaikan atau kehancuran manusia. Namun yang menentukan untuk apa dan ke arah mana kekuatan teknologi komunikasi bukannya teknologi komunikasi itu sendiri, melainkan manusia.¹

Proses komunikasi jelas tidak menginginkan hal-hal yang negatif, melainkan penggunaan teknologi komunikasi yang lebih maju diharapkan dapat mempercepat penerusan nilai-nilai² yang dapat memperkembangkan kebudayaan sendiri dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa. Dalam GBHN 1983 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dengan demikian, teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan dan bahkan dapat digunakan untuk mempercepat perwujudan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Sebagaimana diketahui, pendidikan nasional dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu jalur informal, non-formal, dan formal. Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed berpendapat bahwa teknologi pendidikan mencakup *hardware* berupa kapur dan papan tulis, gunting dan lem, potlot dan kertas, barang cetakan, proyektor film, radio, televisi, satelit komunikasi dan komputer, serta seluruh metode untuk mengatur dan mempergunakan segala benda tersebut sebagai komponen dari suatu sistem belajar-mengajar dan teknik untuk menciptakan *software* atau bahan pelajaran yang mengiringi *hardware*.² Berdasarkan ruang lingkup teknologi pendidikan itu, teknologi komunikasi dapat dipakai dalam jalur informal, non-formal dan formal.

¹Lihat Daoed Joesoef, "Pendidikan Nasional Membentuk Manusia Seutuhnya," *Sinar Harapan*, 24 Januari 1984.

²Lihat Philip H. Combs & Manzoor Ahmed, *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-Formal* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 251.

Melalui jalur informal, proses belajar-mengajar berlangsung dalam keluarga, terutama antara orang tua dan anak. Dalam jalur ini, penerusan nilai-nilai dan gagasan-gagasan lebih banyak dilakukan dan ditentukan oleh semangat, sikap dan perilaku orang tua. Namun seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebagian besar waktu orang tua dipergunakan untuk bekerja di luar keluarga, sehingga waktu untuk mendidik anak sangat terbatas. Dalam keterbatasan waktu ini, orang tua dapat mendayagunakan beberapa jenis teknologi komunikasi sebagai teknologi pendidikan anak-anak, seperti buku, kaset radio, kaset video ataupun komputer yang mengandung nilai-nilai edukatif.

Bagi masyarakat Indonesia saat ini, komputer barangkali masih dianggap sangat mahal. Namun, kepesatan perkembangan industri elektronika, seperti penemuan silikon chip dan robot, memungkinkan produksi komputer secara massal di masa mendatang, sehingga harganya akan menjadi relatif murah dan mungkin dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Di samping itu, ketidaktahuan dalam menggunakan komputer saat ini diperkirakan juga akan teratasi dengan ditemukannya bahasa komputer baru "LOGO," yang memungkinkan anak-anak usia Taman Kanak-kanak belajar dengan baik tanpa melalui pendidikan formal. Ini semua menunjukkan bahwa komputer dapat dimanfaatkan oleh orang tua sebagai teknologi pendidikan anak-anak, terutama untuk menggerakkan potensi daya pikirnya.

Tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Namun, karena keluarga berada di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak mungkin mengasingkan diri dari masyarakat. Di samping itu, keterbatasan orang tua tidak memungkinkan penanganan pendidikan anak-anak secara keseluruhan, sehingga dengan kesadaran yang mendalam mereka menyerahkan sebagian tugas pendidikan anak-anak kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Melalui jalur non-formal ini, baik melalui kursus-kursus ataupun latihan-latihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat, beberapa jenis teknologi komunikasi juga dapat dimanfaatkan sebagai teknologi pendidikan. Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed berpendapat bahwa efektivitas biaya suatu program pendidikan non-formal ditentukan bukan oleh bahan pokok yang diajarkan, melainkan oleh sarana dan alat perlengkapan yang dipergunakannya. Bahkan dalam bidang yang lebih luas, kemampuan suatu negara yang sedang berkembang untuk memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan akan pendidikan bukan ditentukan oleh sumber daya yang dapat disediakan, tetapi oleh tersedianya dan penggunaan teknologi pendidikan secara tepat guna.¹

¹*Ibid.*

Beberapa hasil penelitian Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed di RRC, Korea Selatan, India, Ghana, Senegal, Tanzania, Meksiko dan Ekuador menunjukkan bahwa penggabungan beberapa jenis teknologi komunikasi, seperti poster, radio, film dan kesenian tradisional, sebagai teknologi pendidikan non-formal untuk meningkatkan produksi pertanian di negara-negara tersebut ternyata berhasil baik. Keberhasilan itu memperkuat kesimpulan analisa Everett M. Rogers dan Floyd Shoemaker bahwa efek media komunikasi massa dalam masyarakat petani di negara-negara sedang membangun akan menjadi lebih besar jika penggunaan media massa itu dirangkaikan dengan media tradisional, seperti komunikasi interpersonal.¹ Jika peranan teknologi komunikasi bagi orang dewasa, khususnya masyarakat petani begitu besar, maka peranannya bagi pembaharuan pemikiran, sikap dan perilaku orang-orang yang lebih muda usianya, khususnya para siswa dari kursus-kursus ataupun latihan-latihan ketrampilan, kiranya akan lebih besar. Ini berarti bahwa jalur pendidikan non-formal dapat menjadi perintis dalam penerapan teknologi komunikasi baru dan bahkan dapat dimanfaatkan sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang sangat berguna bagi pendidikan formal.

Peranan pendidikan non-formal semakin penting bagi masyarakat karena pendidikan formal memiliki kemampuan yang terbatas. Dalam Tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang berumur 10 tahun ke atas hanya berpendidikan rendah. Ini menunjukkan bahwa mereka kurang dan bahkan mungkin sekali tidak memiliki ketrampilan yang siap pakai. Oleh karena itu mereka perlu mendapat pendidikan lanjutan dalam pendidikan non-formal. Namun semakin banyaknya minat pada pendidikan non-formal juga dapat menimbulkan masalah, seperti terbatasnya jumlah guru yang trampil, ruang dan alat perlengkapan belajar-mengajar lainnya. Masalah tersebut kiranya dapat diatasi dengan menerapkan teknologi komunikasi baru, seperti kaset radio ataupun kaset video mengenai pengetahuan ketrampilan. Penerapan beberapa jenis teknologi komunikasi baru itu, diperkirakan akan menciptakan mutu hasil pendidikan non-formal secara seragam. Bobot pendidikan non-formal yang semakin luas dan dalam, diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, sekurang-kurangnya mampu menolong dirinya sendiri.

Seperti dalam jalur non-formal, pelaksanaan pendidikan melalui jalur formal, yakni dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, juga menghadapi berbagai masalah, antara lain keterbatasan ruangan kelas, kekurangan guru dan buku-buku pelajaran yang bermutu. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai usaha, seperti pendirian gedung-gedung se-

¹Lihat Everett M. Rogers & Floyd Shoemaker, *Communication of Innovations* (New York: The Free Press, 1971).

kolah baru, penataran guru-guru dan pengadaan buku-buku pelajaran. Di samping itu, pemerintah juga telah merintis SMP Terbuka dan sistem pengajaran jarak jauh dengan pelaksanaan Universitas Terbuka mulai tahun ajaran 1984/1985. Dalam pelaksanaan sistem pengajaran jarak jauh ini, teknologi komunikasi maju, seperti radio, televisi, kaset *tape recorder* dan kaset video, serta pos dan telekomunikasi, mempunyai peranan yang sangat penting.

Di samping berguna dalam sistem pengajaran jarak jauh, kaset *tape recorder*, kaset video dan komputer, baik yang berisi bahan pelajaran intrakurikuler maupun bahan pengayaan dan bahan pemerayaan, juga bermanfaat untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan akibat kekurangan guru yang trampil. Lagi pula teknologi komunikasi itu dapat dimanfaatkan untuk mendorong anak didik menjadi lebih sadar pengetahuan ilmiah, bukannya sekedar mengejar gelar akademis. Ini berarti bahwa penerapan beberapa teknologi komunikasi maju, khususnya komputer, tidak semata-mata dilihat sebagai produk, melainkan juga sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Prof. Andi Hakim Nasoetion menyatakan bahwa metode statistika dan kemampuan berkomunikasi dengan komputer untuk menangani data merupakan persyaratan untuk memahami bahasa pengantar metode penelitian.¹ Dengan demikian, teknologi komunikasi dapat didayagunakan untuk mendorong pengembangan perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah, yaitu sebagai pusat pemeliharaan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan.

PENUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, telah melanda ke seluruh dunia, sehingga mustahil kita dapat menghindarkan diri dari pengaruhnya. Bahkan beberapa jenis teknologi komunikasi tersebut sengaja diundang guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Namun kemajuan perkembangan teknologi komunikasi di negara kita ternyata belum merata, terutama karena kemampuan untuk membeli perangkat keras teknologi komunikasi dari masyarakat masih lemah dan tidak merata. Di samping itu, sebagian besar masyarakat masih berpendidikan rendah, sehingga kemampuan memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi komunikasi sangat rendah. Ketimpangan penguasaan teknologi komunikasi dan ketimpangan pendidikan masyarakat itu dapat menimbulkan ketidakmerataan pengetahuan, termasuk ketimpangan informasi.

¹Lihat Andi Hakim Nasoetion, "Pendidikan Pascasarjana," *Kompas*, 12 Maret 1984.

Keadaan itu menunjukkan tidak etisnya penerapan teknologi komunikasi, karena sekelompok manusia negara maju menguasai atau memanipulasi manusia-manusia negara yang sedang membangun. Bahkan mungkin juga terjadi kehidupan bangsa dikuasai oleh sekelompok warga bangsanya sendiri. Oleh sebab itu perlu diciptakan kebijaksanaan yang terpadu, terutama antara kebijaksanaan komunikasi dan pendidikan nasional, dalam mendayagunakan teknologi komunikasi maju sebagai teknologi pendidikan. Sehubungan dengan pelaksanaan sistem pengajaran jarak jauh, seperti universitas terbuka, program dan jam siaran radio dan televisi untuk acara pendidikan perlu ditambah, antara lain dengan menambah saluran TVRI yang secara khusus untuk acara pendidikan. Sementara itu, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan dan pemilikan teknologi komunikasi, perlu dipikirkan kemungkinan penggandaan dan penyebaran kaset pendidikan serta pengadaan perangkat keras bagi sekolah-sekolah.

Perkembangan di bidang teknologi komunikasi sebagai teknologi pendidikan memungkinkan pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi oleh banyak warga masyarakat. Selanjutnya dengan semakin banyaknya mahasiswa ataupun magister yang mampu berkomunikasi dengan teknologi pendidikan, khususnya komputer, lambat-laun kita akan mampu membuat perangkat keras dan menyusun perangkat lunak untuk menggunakan perangkat keras teknologi pada umumnya. Dengan demikian, pada suatu ketika kita tidak lagi hanya menjadi pasaran ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara maju, melainkan juga menjadi produsen dan sumber informasi yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia sendiri.

Universitas Terbuka: Alternatif Baru Pendidikan Tinggi Kita

BABARI*

PENGANTAR

Setiap tahun ajaran baru lembaga pendidikan tinggi negeri selalu menghadapi masalah kecilnya daya tampung dibandingkan dengan jumlah lulusan SMTA yang ingin melanjutkan studinya. Universitas swasta pada umumnya menjadi pilihan kedua dari calon mahasiswa sebab biayanya mahal, kadang kala statusnya belum jelas, lamanya masa belajar belum pasti baik karena kurangnya tenaga dosen ataupun karena harus menempuh ujian negara lagi. Keadaan semacam ini menyebabkan lulusan SMTA dari keluarga yang status sosial ekonominya lemah dan tidak diterima di universitas/institut negeri tidak dapat melanjutkan studinya. Dan karena kesempatan kerja yang tersedia juga terbatas maka mereka terpaksa menganggur sambil menunggu kemungkinan untuk mengikuti lagi tes masuk universitas/institut negeri pada tahun ajaran berikutnya. Kondisi seperti ini akan menjadi suatu "lingkaran setan" yang terus berulang setiap tahun.

Menghadapi masalah seperti ini pemerintah sejak awal tahun 1980 telah mencoba mencari alternatif untuk memperluas daya tampung dan memperbesar kesempatan belajar di universitas/institut negeri bagi para lulusan SMTA yang ingin melanjutkan studinya. Alternatif yang ditemukan adalah melaksanakan Universitas Terbuka seperti yang telah dilakukan di beberapa negara lain. Mengingat sebagian besar masyarakat kita masih belum mengetahui tentang Universitas Terbuka ini maka tulisan ini disusun dengan tujuan membantu menjelaskan masalah Universitas Terbuka ini dan sekaligus sebagai *urun rembug* dengan pihak penyelenggara agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan maksud dari pembukaan Universitas Terbuka ini.

*Staf CSIS.

USAHA PEMERINTAH

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah siap melaksanakan program pendidikan tingkat perguruan tinggi melalui Universitas Terbuka. Panitia Persiapan Universitas Terbuka telah dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0164/P/1983 tertanggal 22 Oktober 1983. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan dan merencanakan semua kegiatan belajar-mengajar dengan sistem belajar jarak jauh. Masa penerimaan mahasiswa berlangsung dari tanggal 30 April sampai dengan 30 Juni 1984 melalui 24 buah kantor pos dan 24 buah universitas dan institut negeri di seluruh wilayah tanah air. Seleksi akan dilaksanakan dalam bulan Juli dan hasilnya akan diumumkan tanggal 1 Agustus 1984. Mereka yang diterima harus mendaftarkan kembali (registrasi) antara tanggal 2 dan 15 Agustus 1984. Pendaftaran dan seleksi bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti program diploma (DI-DII) akan diatur oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, dan pendaftaran peserta Program Akta V (dosen) akan diatur oleh rektor perguruan tinggi dan Kopertis yang bersangkutan. Tahun ajaran akan dimulai minggu pertama bulan September 1984.

Jumlah mahasiswa yang akan diterima untuk tahun ajaran ini sebanyak 25 ribu orang yang terdiri atas 10 ribu orang lulusan SMTA untuk program S1 (sarjana), 10 ribu orang untuk program Diploma (DI-DII) yang akan menjadi guru SMTP/SMTA dan 5 ribu orang dosen yang mengikuti program Akta V-A (kependidikan) dan V-B (non-kependidikan). Bidang-bidang studi bagi para mahasiswa yang mengikuti program S1 terdiri atas administrasi negara, administrasi niaga, ekonomi, studi pembangunan, dan statistika terapan. Dalam tahun-tahun berikutnya jumlah bidang studi ini akan ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bidang studi untuk peserta program diploma dan akta dapat dilihat dalam formulir pendaftaran.

Pemakaian kata "Terbuka" menunjukkan bahwa universitas ini akan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki ijazah SMTA untuk menjadi calon mahasiswanya, dan selanjutnya setiap mahasiswa yang diterima bebas menentukan program studi, irama studi, dan waktu serta tempat studinya. Ini sesuai dengan tujuan pembukaan Universitas Terbuka, yaitu memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tempat kerja atau tempat tinggalnya; dan untuk memperluas kesempatan belajar lebih lanjut bagi lulusan SMTA yang dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya. Dalam hal ini Universitas Terbuka bersifat padat teknologi, karena kuliah diberikan dari jarak jauh melalui media elektronika dan bahan kuliah dicetak dalam bentuk paket-paket modul belajar.

Program pendidikan melalui Universitas Terbuka ini tentu telah didahului oleh suatu pengamatan akan kemauan dan kemampuan untuk menyediakan sarana dan fasilitas media komunikasi proses belajar mengajar jarak jauh. Selain itu tentu telah dilakukan studi perbandingan mengenai Universitas Terbuka ini di negara-negara yang telah menerapkannya, seperti Inggris, Belanda, Jerman, Muangthai dan Malaysia. Dari studi perbandingan itu panitia penyelenggara dapat menetapkan bentuk Universitas Terbuka yang sesuai dengan kondisi geografis negara kita yang berbentuk kepulauan dan luas ini. Untuk itu dalam bulan Januari di Jakarta panitia telah melaksanakan seminar yang diikuti oleh para ahli dari dalam ataupun luar negeri yang berpengalaman mengenai Universitas Terbuka.

ALTERNATIF BARU

Setiap tahun jumlah lulusan SMTA yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas tidak seimbang dengan jumlah tempat yang tersedia di 44 perguruan tinggi negeri dan 342 perguruan tinggi swasta. Menurut perhitungan sementara, lulusan SMTA tahun ajaran ini sekitar 500 ribu orang sedangkan tempat yang tersedia di semua perguruan tinggi hanya sekitar 80-90 ribu. Oleh karena itu Universitas Terbuka merupakan salah satu alternatif untuk memperluas daya tampung pada tingkat perguruan tinggi. Melalui Universitas Terbuka ini rencana pemerintah untuk meningkatkan daya tampung dari 5% menjadi 8,2% bagi anak kelompok umur pendidikan tinggi yang memiliki ijazah SMTA mungkin dapat terwujud dalam Pelita IV.

Oleh karena itu panitia penyelenggara harus sungguh-sungguh melaksanakannya. Apabila Pemerintah Inggris memerlukan waktu 8 tahun dan Belanda 7 tahun untuk mempersiapkannya, maka di Indonesia gagasan Universitas Terbuka ini mulai dilontarkan sekitar tahun 1980. Ini berarti masa persiapan, mulai dari pengolahan gagasan, analisa alternatif, persiapan sarana dan fasilitas dan penataan institusi hanya sekitar 3 atau 4 tahun. Oleh sebab itu orang-orang bertanya apakah dengan masa persiapan yang singkat ini Universitas Terbuka mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pusat pengamalan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Apakah Universitas Terbuka mampu mengembangkan fungsinya, yaitu untuk: (1) menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran; (2) menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni; (3) menyelenggarakan pengabdian masyarakat; (4) menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan hu-

bungannya dengan lingkungan sekitar; dan (5) menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi.¹

INSTITUSI UNIVERSITAS TERBUKA

Sebagai lembaga pendidikan tinggi negara yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, struktur institusi Universitas Terbuka ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 1980 tentang *Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri*. Menurut peraturan ini susunan organisasi universitas terdiri dari: (1) unsur pimpinan (rektor dan pembantu rektor); (2) unsur pembantu pimpinan (biro); (3) unsur pelaksana (fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian pada masyarakat); dan (4) unsur penunjang (unit pelaksana teknis dan instalasi). Dan susunan organisasi fakultas terdiri dari dekan, pembantu dekan, bagian tata usaha fakultas, jurusan, kelompok pengajar, laboratorium/studio, unit pelaksana teknis, dan instalasi.

Tentu struktur institusi seperti ini akan dibentuk di tingkat pusat. Masalahnya adalah bagaimana struktur institusi ini di daerah yang ditetapkan sebagai pusat-pusat studi? Apakah sama strukturnya seperti di pusat ataukah hanya semacam institusi tingkat cabang dari Universitas Terbuka? Apakah institusi tingkat cabang ini akan berada di bawah koordinasi universitas/institut negeri daerah yang dewasa ini ditunjuk sebagai tempat pendaftaran bagi calon mahasiswa Universitas Terbuka? Koordinasi kerja antara kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan daerah dan kantor-kantor pos yang ditunjuk untuk menjadi tempat pendaftaran dan proses urusan administrasi bagi mahasiswa Universitas Terbuka perlu ditata dan dibina sebaik mungkin.

Struktur institusi yang jelas di tingkat pusat dan daerah serta koordinasi kerja yang baik di antara semua unsur penyelenggara Universitas Terbuka ini sangat membantu pelaksanaan Universitas Terbuka ini. Hal ini penting untuk membangkitkan minat masyarakat umumnya atau tamatan SMTA khususnya untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Karena Universitas Terbuka merupakan alternatif baru dalam lingkungan pendidikan tinggi, pihak penyelenggara perlu menarik dan meyakinkan masyarakat terhadap lembaga ini. Penyelenggara yang dalam hal ini yaitu aparat pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya agar tujuan Universitas Terbuka dapat tercapai, karena semuanya sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan para penyelenggaranya.

¹Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1980 tentang *Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri*.

SARANA DAN FASILITAS

Proses belajar-mengajar dalam Universitas Terbuka dilakukan dari jarak jauh melalui media komunikasi elektronika dan bahan kuliah cetakan dalam bentuk modul yang dikirimkan kepada mahasiswanya melalui kantor pos dan giro. Para mahasiswa wajib mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan secara periodik melalui media TVRI atau RRI. Apabila menemukan masalah, mahasiswa dapat mengirimkan pertanyaan tertulis kepada dosen pembina di pusat atau dosen pembimbing di setiap pusat studi. Selain itu bahan kuliah direkam dalam kaset yang selalu ada di setiap pusat studi. Namun mahasiswa dapat belajar materi kuliah itu dalam bentuk tercetak yang dikirimkan kepadanya. Oleh karena itu Universitas Terbuka memperkenalkan cara belajar mandiri, dalam hal mana mahasiswa dapat belajar di mana pun dan bilamana pun.

Komunikasi tatap muka antara dosen pembimbing mata kuliah dan para mahasiswa dilakukan di setiap pusat studi. Di setiap pusat studi harus tersedia sarana dan fasilitas pendidikan seperti kaset, video film, dan mikro film untuk mempermudah proses belajar mahasiswa. Maka dari itu lokasi pusat-pusat studi harus dipilih sedemikian rupa sehingga dapat memanfaatkan laboratorium, perpustakaan ataupun fasilitas lainnya dari suatu perguruan tinggi yang sudah ada di daerah itu.

Oleh karena itu pada setiap pusat studi diperlukan semacam institusi yang mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar ini. Institusi lokal ini menetapkan waktu mahasiswa yang mengambil program studi yang sama berkumpul di pusat studi, jadwal kegiatan belajar-mengajar, dan sarana serta fasilitas penunjang lainnya. Setiap mahasiswa tidak diwajibkan untuk berkumpul di pusat-pusat studi. Apabila seorang mahasiswa sanggup menyelesaikan satu paket kuliah, dalam arti menjawab soal-soal dalam salah satu modul, dan mengirimnya langsung ke dosen pembina mata kuliah, maka ia tidak perlu hadir dalam setiap pertemuan di pusat studi. Namun untuk saling mengenal antar sesama mahasiswa yang mengikuti program yang sama ataupun untuk mengenal dosen pembimbing mata kuliah di pusat studi, dianjurkan agar sewaktu-waktu berkumpul bersama-sama teman di pusat-pusat studi, terutama pada tes akhir modul.

Melihat interaksi antara mahasiswa dan dosen pembimbing mata kuliah dalam kuliah jarak jauh ini, timbul pertanyaan apakah sarana dan fasilitas komunikasi yang tersedia dewasa ini mampu menunjang pelaksanaan belajar-mengajar di Universitas Terbuka? Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam bidang komunikasi baik media cetak maupun media elektronika, sebagai hasil penggunaan satelit Palapa sejak tahun 1976. Sebagai media penerangan, media elektronika seperti TVRI dan RRI juga berfungsi sebagai media pen-

didikan. Universitas Terbuka akan memanfaatkan jasa TVRI dan RRI sebagai media belajar-mengajar jarak jauh, selain jasa kantor pos dan giro sebagai sarana distribusi paket-paket materi kuliah tercetak atau rekaman. Agar semua media komunikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal demi kelancaran program belajar-mengajar Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjalin kerjasama yang erat dengan departemen-departemen lain seperti Departemen Perhubungan, Departemen Penerangan, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Departemen Dalam Negeri.

Pada tanggal 14 Maret 1984, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perusahaan Umum Pos dan Giro telah melakukan penandatanganan naskah kerjasama. Dalam kerjasama ini Universitas Terbuka akan menggunakan jasa Perusahaan Umum Pos dan Giro untuk keperluan distribusi formulir, penjualan formulir, penerimaan Sumbangan Pendidikan (SPP), pendistribusian dan penjualan bahan-bahan kuliah, bahan ujian, buletin berkala dan pengiriman kembali bahan/dokumen dari mahasiswa ke pusat-pusat studi regional ataupun ke pusat Universitas Terbuka di Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjalin kerjasama dengan Departemen Penerangan, khususnya Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film untuk menyusun bersama program-program siaran pendidikan yang akan diisi oleh dosen pembina Universitas Terbuka. Perlu dicatat bahwa penetapan waktu siaran harus disesuaikan dengan pembagian wilayah menurut waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Dan jalur khusus untuk siaran pendidikan Universitas Terbuka melalui TVRI ataupun RRI ini mungkin perlu dipikirkan.

Menurut buku "Statistik Komunikasi" yang diterbitkan oleh BPS, pada tahun 1980 jumlah kantor pos termasuk kantor pos tambahan, kantor pos pembantu dan rumah pos di seluruh pelosok tanah air adalah sebesar 2.838 buah. Ini berarti bahwa sarana pendistribusian dan penjualan bahan kuliah ataupun pengiriman kembali bahan dari mahasiswa ke pusat-pusat studi cukup memadai. Masalahnya adalah bagaimana mengoptimalkan koordinasi kerja antara karyawan penyelenggara Universitas Terbuka dan karyawan kantor pos sehingga semua bahan dapat diterima tepat pada waktunya. Lagi pula, jaringan telepon telah berkembang pesat sejak pemakaian Palapa. Apabila pada awal Pelita II, Sentral Telepon Otomat hanya mampu menyediakan 125 ribu satuan sambungan telepon, pada tahun 1982/1983 telah ditingkatkan menjadi 553 ribu satuan sambungan. Ini berarti bahwa kapasitas telepon meningkat rata-rata sebesar 38,1% setiap tahun.¹ Tiga pemancar gelombang

¹Lihat *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*, di depan *Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1983, Sektor Perhubungan, Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial*.

pendek dengan kapasitas masing-masing 100 KW dengan sasaran pengarahannya satu ke Sumatera, satu ke Kalimantan dan satu ke wilayah Sulawesi dan sekitarnya telah dioperasikan untuk memantapkan jangkauan siaran RRI di dalam negeri. Sementara itu jumlah pemancar televisi di seluruh tanah air adalah sebanyak 186 buah.¹

KARAKTERISTIK UNIVERSITAS TERBUKA

Sebagai salah satu sub-sistem dalam lingkungan perguruan tinggi yang dikelola langsung oleh pemerintah, Universitas Terbuka mempunyai beberapa karakteristik. *Pertama*, Universitas Terbuka merupakan jalur pendidikan formal yang proses belajar-mengajarnya tidak dilakukan secara tatap muka dalam gedung/ruang kuliah tetapi memakai sistem kuliah jarak jauh melalui media komunikasi elektronik. *Kedua*, materi kuliah diberikan dalam bentuk unit-unit modul oleh satu tim dosen sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri. Apabila menemui kesulitan, maka mahasiswa sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat mengajukan pertanyaan kepada dosen pembina mata kuliah melalui telepon, interlokal, teleks, surat kilat, telegram atau kepada dosen pembimbing mata kuliah di setiap pusat studi. Mahasiswa yang mengambil program studi yang sama secara berkala bertemu di setiap pusat studi untuk memperoleh bimbingan belajar bersama dari dosen pembimbing atau untuk mengikuti evaluasi akhir semester. *Ketiga*, kurikulum sama dengan kurikulum universitas negeri dan juga menggunakan sistem kredit semester. Untuk program S1 dipersyaratkan 144-160 sks (satuan kredit semester); program D1 40-50 sks; DII 80-90 sks dan program Akta V 20 sks bagi mereka yang telah memiliki 160 sks. *Keempat*, sistem ujian di Universitas Terbuka terdiri atas empat tahap, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa melalui bahan tes dari setiap modul, evaluasi oleh dosen pembimbing di setiap pusat studi pada akhir setiap unit modul, dan evaluasi oleh dosen pembina pada setiap akhir semester, serta ujian akhir. *Kelima*, uang kuliah (SPP) akan diatur tersendiri oleh pihak penyelenggara. *Keenam*, ijazah berstatus sama dengan ijazah universitas negeri.

Sesuai dengan prinsip belajar mandiri, kegiatan belajar mahasiswa Universitas Terbuka dapat digambarkan sebagai berikut: (1) mahasiswa belajar sendiri bahan kuliah tertulis/rekaman yang telah diterimanya dari pusat Universitas Terbuka; (2) mengadakan interaksi dengan dosen pembimbing (tutor) dalam bentuk belajar tatap muka berkala di pusat-pusat studi ataupun jarak jauh; (3) interaksi dengan sesama rekan mahasiswa yang mengambil program studi yang sama di pusat-pusat studi ataupun di lingkungan kerja dan

¹*Ibid.*

tempat tinggal masing-masing; (4) mendengarkan dan menyaksikan program belajar melalui TVRI ataupun RRI; dan (5) melaksanakan praktikum atau kerja lapangan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari pimpinan Universitas Terbuka. Untuk jangka panjang Universitas Terbuka harus menyiapkan sendiri peralatan laboratorium di setiap pusat studi.

Agar motivasi belajar mandiri dapat berkembang, sebaiknya dalam proses penerimaan mahasiswa baik yang mengikuti program D1/II ataupun program S1 diperhatikan hal-hal berikut. Dari 10 ribu mahasiswa yang mengikuti program Diploma, sebagian sebaiknya terdiri dari guru-guru SMTP/SMTA setempat yang belum dapat mengikuti program pendidikan tinggi melalui IKIP dan FKIP, karena keterbatasan waktu atau kesempatan. Demikian juga sebagian dari 10 ribu mahasiswa yang mengikuti program S1 sebaiknya terdiri dari pegawai negeri atau karyawan swasta yang berijazah SMTA tetapi belum dapat mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dengan alasan pekerjaan atau tempat tinggal yang jauh dari kampus. Umumnya kelompok mahasiswa seperti ini lebih memiliki kesiapan mental untuk belajar secara mandiri daripada calon mahasiswa yang baru tamat SMTA. Jelas sebagian lainnya dapat diterima dari siswa yang baru lulus SMTA. Dengan cara ini siswa yang baru lulus SMTA yang mungkin belum biasa dengan cara belajar mandiri mungkin sekali menerima pengaruh/bimbingan dari mereka yang telah bekerja.

METODE KULIAH

Di universitas atau institut biasa, proses belajar-mengajar (kuliah) dilakukan secara tatap muka dan sebagian besar dosen terutama dosen jurusan ilmu-ilmu sosial menggunakan metode ceramah. Oleh karena itu pihak yang aktif dalam proses ini adalah dosen, sedangkan mahasiswa umumnya hanya mendengar dan mencatat apa yang dikuliahkan. Dalam sistem kuliah jarak jauh Universitas Terbuka ini, bahan kuliah umumnya telah dibaca oleh para mahasiswa sebelum kuliah itu diberikan oleh dosen melalui TVRI atau RRI. Oleh karena itu metode ceramah sebaiknya diganti dengan metode pemecahan masalah sehingga mahasiswa tidak hanya sekedar mendengar dan mencatat tetapi juga memecahkan masalah-masalah yang lebih merangsang daya pikirannya. Maka para dosen pembina atau pembimbing mata kuliah perlu menyadari bahwa kecepatan belajar mahasiswa secara mandiri akan tergantung pada metode atau cara yang digunakan dalam proses belajar-mengajar, apakah hanya didasarkan atas pendengaran, penglihatan ataukah kombinasi antara penglihatan dan pendengaran (penggunaan audiovisual aids) serta motorika. Para dosen perlu menyiapkan bahan kuliah secara sistematis yang dimulai dari pemberian informasi mengenai konsep, teori, dan gagasan, pemberian contoh, bagan atau gambar, dan akhirnya pemberian kesempatan kepada maha-

siswa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh dosen.¹

Sementara itu dosen pembimbing mata kuliah di pusat studi dapat membagi 90 menit waktu kuliahnya atas 40 menit pertama, di mana mahasiswa mendiskusikan materi-materi yang telah dipelajarinya melalui modul, 30 menit kedua, di mana dosen pembimbing menjawab pertanyaan yang belum terjawab oleh mahasiswa dalam diskusi; dan 20 menit terakhir, di mana dosen pembimbing menjelaskan materi dari unit modul lanjutannya untuk dipelajari sampai dengan pertemuan yang berikutnya.² Pembagian waktu seperti ini hanya merupakan contoh. Dosen pembimbing dapat membaginya secara lain ataupun menggunakan metode-metode lain seperti seminar, panel diskusi, dan metode kasus. Makin banyak metode yang dipakai secara bergantian mungkin hasilnya akan makin baik, mengingat tidak ada satu metode pun yang ampuh.

Pemilihan metode yang tepat dalam suatu proses belajar-mengajar jarak jauh sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dosen pembina dan pembimbing mata kuliah. Ini berarti bahwa sebelum memberi kuliah dosen harus merumuskan secara tepat tujuan yang ingin dicapai melalui kuliahnya, menyajikan bahan secara teratur, menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar, dan merangsang kemauan mahasiswa untuk memecahkan sendiri masalah. Yang perlu diwaspadai adalah bahwa kontak antara dosen dan mahasiswa harus tetap terjalin. Komunikasi tidak langsung dalam proses belajar-mengajar ini bisa menimbulkan kebosanan atau kejenuhan tertentu baik dari pihak dosen ataupun dari mahasiswa. Oleh sebab itu metode yang tepat dan bisa menentukan situasi yang menyenangkan perlu diusahakan.

PENUTUP

Mengingat pembukaan Universitas Terbuka ini tidak melalui tahap "uji coba" dengan waktu persiapan yang singkat, para pengelola atau penyelenggara harus bekerja sungguh-sungguh dan siap mental untuk menerima pujian ataupun kritikan masyarakat luas. Para pengelola administrasi baik di tingkat pusat maupun di pusat-pusat studi regional harus sudah mulai bekerja sejak saat pendaftaran mahasiswa dan seterusnya. Tim-tim pengadaan materi pelajaran dan jalur informasi serta komunikasi antara pusat dan pusat-pusat studi di daerah harus sudah siap bekerja dan ditata dalam satu sistem kerja yang jelas.

¹Proyek Pembinaan Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1977-1978, *Kumpulan Metode-metode Latihan Kepemimpinan Mahasiswa*, hal. 11-16.

²Sondra M. Napel, *Memperbaharui Cara Memberi Kuliah* (Jakarta: USICA, 1978), hal. 4-5.

Universitas Terbuka juga harus mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Oleh karena itu para penyelenggara harus tetap berikhtiar sejak awal bahwa lulusannya harus bermutu dan memiliki ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan. Lagi pula Universitas Terbuka juga berkewajiban untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh, sehingga bisa mengembangkan fungsi perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sarana untuk menciptakan modernisasi di segala segi kehidupan bernegara-bangsa. Namun kita semua perlu menyadari bahwa usaha mewujudkan suatu Universitas Terbuka yang sesuai dengan tujuan dan maksudnya memerlukan perjuangan dan pengorbanan dari seluruh lapisan masyarakat.

JENIS PROGRAM STUDI UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 1984/1985

Strata Pendidikan	Program Studi	Keterangan
I. PROGRAM SARJANA (S ₁)	1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2. Ilmu Administrasi Negara 3. Ilmu Administrasi Niaga 4. Statistika Terapan	
II. PROGRAM DIPLOMA KEPENDIDIKAN D I	1. Bahasa Indonesia 2. Keterampilan PKK 3. Matematika	4. Pendidikan Moral Pancasila 5. Pendidikan Luar Sekolah 6. Keterampilan Jasa
D II	1. Keterampilan Jasa 2. Pendidikan Luar Sekolah 3. Ilmu Pengetahuan Alam 4. Bahasa Indonesia 5. Matematika 6. Pendidikan Moral Pancasila	7. Bahasa Inggris 8. Ilmu Pengetahuan Sosial 9. Keterampilan PKK 10. Olah Raga dan Kesehatan 11. Keterampilan Teknik
III. PROGRAM AKTA	Pendidikan	
AKTA V/A (untuk dosen non-kependidikan)		
AKTA V/B (untuk dosen kependidikan)	1. Matematika 2. Kimia 3. Biologi 4. Pendidikan 5. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 6. Bimbingan dan Konseling	7. Sejarah 8. Ekonomi 9. Pendidikan Moral Pancasila 10. Bahasa Indonesia 11. Bahasa Inggris

Kurikulum 1984

Dj. SOEKMONO

PENGANTAR

Masyarakat pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya sedang menanti-nanti Kurikulum 1984 yang segera akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 1984/1985. Berbagai penerangan telah disampaikan oleh pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat luas melalui pelbagai media massa. Selain itu, tanggapan dari berbagai pihak telah disampaikan melalui wawancara, berita, dan artikel, terutama lewat pers. Penulis ingin mengemukakan beberapa pandangan mengenai Kurikulum 1984, yang sedang berada dalam tahap penggarapan, dalam rangka *urun rembuk* guna mendapatkan apa yang kita harapkan bersama.

Tanggapan terhadap Kurikulum 1984 seyogyanya bertolak dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 22 Oktober 1983. Dari keputusan itu, yang terpenting adalah pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: "Mengadakan perbaikan terhadap kurikulum yang mencakup: (a) peninjauan kembali dan perbaikan komponen kurikulum secara menyeluruh melalui pendekatan pengembangan dengan bertitik tolak pada: (1) pilihan kemampuan dasar, baik pengetahuan maupun ketrampilan yang perlu dikuasai siswa dalam pembentukan kemampuan dan watak; (2) keterpaduan dan keserasian antara matra kognitif, psikomotor, dan afektif; (3) penyesuaian tujuan dan struktur program dengan perkembangan masyarakat, pembangunan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bidang/program pendidikan yang berdiri sendiri, dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas termasuk pendidikan luar sekolah; (c) pengadaan program studi baru yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan perkembangan di lapangan kerja."

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: "Sejak tahun ajaran 1984/1985 upaya perbaikan kurikulum secara terus-menerus tetap diadakan dengan bertitik tolak dan mengarah pada pemantapan usaha: (a) pengembangan kurikulum inti dan program khusus bagi kepentingan kelompok tertentu di masyarakat; (b) penerapan analisis sistem dalam penentuan bidang minat dan sasaran kurikulum; (c) pengwujudan asas keluwesan dalam isi kurikulum maupun pengelolaan proses belajar-mengajar dalam kerangka pengembangan pengajaran intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler; (d) kemungkinan penyesuaian sistem dengan kecepatan belajar para siswa secara perorangan ataupun kelompok; (e) pendekatan program kepada ketuntasan belajar dalam masing-masing bagian maupun keseluruhan program kurikulum; (f) efisiensi proses belajar; (g) penerapan konsep berorientasi pada lapangan/bidang pekerjaan dalam kurikulum pendidikan kejuruan; (h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan."

PENJURUSAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa ibukota (beberapa waktu yang lalu), menyatakan bahwa SMA Bahasa, IPA, dan IPS dihapuskan, sedangkan sekolah demikian yang tadinya berdiri sendiri dan berada di satu gedung, di gedung yang berdampingan, atau gedung yang berdekatan digabung menjadi satu SMA. SMA dengan kurikulum yang telah disempurnakan dan oleh sebab itu tidak lagi merupakan SMA Bahasa, IPA, dan IPS, dimungkinkan mengadakan berbagai program belajar, tidak saja untuk mempersiapkan anak didik yang memenuhi persyaratan tertentu buat pendidikan lanjutan di perguruan tinggi melainkan juga untuk mempersiapkan anak didik yang mempunyai bakat, minat dan tujuan lain buat pendidikan tambahan jenis lain maupun agar dapat bekerja di lapangan kerja.

Dari struktur program Kurikulum SMA 1984¹ yang telah diumumkan, terlihat bahwa terdapat empat paket program yang disediakan bagi mereka yang hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yaitu paket Ilmu-ilmu Fisik, paket Pengetahuan Budaya, paket Ilmu-ilmu Biologi, dan paket Ilmu-ilmu Sosial. Keempat paket ini menggambarkan gugus-gugus ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Dengan demikian, sejak SMA nasib seorang siswa telah ditentukan. Jalur mana di perguruan tinggi yang hendak ditempuh telah ditetapkan melalui pengambilan paket yang relevan. Melihat pembagian jam pelajaran pada setiap paket maka sangat kecil kemungkinan bagi seorang siswa SMA untuk mempersiapkan diri dalam lebih dari satu paket. Oleh ka-

¹Lihat *Kompas*, 19 Pebruari 1984.

rena itu, jelaslah bakal tak terjadi penghapusan jurusan di SMA, sebaliknya terjadi pemekaran jurusan dari 3 jurusan sekarang menjadi 4 jurusan.

Masalah yang dapat diproyeksikan sekarang ialah apakah sebuah SMA mampu menyediakan keempat paket itu dan apakah para siswa dapat terbagi secara agak merata ke dalam masing-masing paket. Kekurangmampuan sekolah dan kekurangmerataan penyebaran siswa akan mempengaruhi *enrolmen* di perguruan tinggi. Misalnya, kalau sekolah tak mampu menyediakan paket Pengetahuan Budaya karena kekurangan guru atau para siswa kurang berminat memilih paket ini, maka jelas akan mengurangi jumlah mahasiswa pada fakultas dan jurusan pengetahuan budaya di perguruan tinggi. Masalah ini sudah harus diproyeksikan guna membenahi penyaluran calon mahasiswa ke fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan "kering" di perguruan tinggi. Penyusunan struktur program ke dalam empat paket itu seolah-olah kurang memperhitungkan kecenderungan minat kaum muda sekarang yang lebih tertarik untuk memilih jurusan eksakta daripada jurusan non-eksakta. Satu segi yang perlu diperhatikan pula ialah apakah para siswa yang telah memilih salah satu paket dijamin penerimaannya di perguruan tinggi. Jaminan itu ada jika tes seleksi masuk ke perguruan tinggi dihapuskan. Akan tetapi, meskipun tes itu dihapuskan apakah perguruan tinggi yang dituju mampu menampung lulusan SMA yang telah dipersiapkan dalam paket tertentu.

Selain menyediakan empat paket guna menyiapkan para siswa ke perguruan tinggi, setiap SMA diharapkan menyediakan paket-paket guna mempersiapkan para siswa yang ingin langsung bekerja setelah tamat SMA. Hal ini menuntut tersedianya jumlah guru yang jauh lebih banyak daripada yang dituntut oleh Kurikulum 1975. Jenis-jenis keahlian guru pun harus lebih bervariasi. Persoalannya ialah apakah lembaga pendidikan tenaga kependidikan, seperti IKIP, mampu mengejar pembaharuan yang dituntut oleh SMA ini.

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, penulis menyarankan prinsip keluwesan yang agak berbeda. Program inti seyogyanya dirancang guna memberikan kemampuan dasar sebagai persyaratan minimal bagi semua lulusan SMA untuk memasuki perguruan tinggi pada fakultas/jurusan mana saja. Program khusus hendaknya dirancang untuk memberikan bekal pengayaan bagi para siswa yang hendak memasuki perguruan tinggi sesuai dengan minat atau cita-citanya, sedangkan program khusus yang lain dirancang guna memberikan bekal persiapan bekerja bagi para siswa yang tak mampu/tak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, seorang siswa masih memiliki peluang untuk memilih fakultas/jurusan di perguruan tinggi yang tak termasuk prioritas pilihan pertamanya. Selain itu, seorang siswa yang mempersiapkan diri untuk bekerja masih dimungkinkan untuk melanjutkan studi-

nya ke perguruan tinggi setelah ia memiliki sumber nafkah sendiri guna membiayai kuliahnya. Wujud kurikulum semacam ini lebih sesuai dengan kondisi sekolah dewasa ini dan kemungkinan perkembangannya di masa mendatang. Prinsip mobilitas pendidikan dalam rangka pendidikan seumur hidup tetap terpelihara. Masa depan lulusan SMA cukup terbuka baik untuk masuk ke perguruan tinggi maupun untuk masuk ke lapangan kerja.

Bidang-bidang pelajaran mana saja yang seyogyanya dimasukkan ke dalam program inti sesuai dengan prinsip keluwesan yang disarankan itu? Bidang-bidang pelajaran itu tentu meliputi bidang-bidang pelajaran yang diwajibkan dalam GBHN, bidang-bidang pelajaran yang lebih memungkinkan siswa untuk meningkatkan dan mempertajam daya penalarannya dan kemampuan mengolah ilmu di perguruan tinggi, serta kemampuan mengembangkan pekerjaan/profesi yang dipilihnya. Dengan demikian, bidang-bidang pelajaran itu antara lain adalah matematika, biologi/fisika/kimia, bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, serta ekonomi dan koperasi.

BEKAL UNTUK BEKERJA

Program khusus bagi para siswa yang hendak memasuki dunia kerja hendaknya dirancang tanpa membahayakan persatuan bangsa. Propinsialisme, daerahisme, bahkan sukuisme perlu dicegah. Tunjangan dari lingkungan perlu diperhitungkan, sehingga pada daerah pertanian disediakan paket ketrampilan pertanian, pada daerah nelayan disediakan paket ketrampilan perikanan, dan pada daerah industri disediakan paket ketrampilan industri.

Namun perlu dipertimbangkan strategi pembangunan yang menganut prinsip Wawasan Nusantara. Pada daerah nelayan yang telah padat penduduk, para siswa mungkin perlu dilatih dalam ketrampilan pertanian agar mereka telah siap jika terpaksa harus bertransmigrasi. Pada daerah pertanian yang kurang produktif para siswa perlu dilatih dalam ketrampilan kerajinan tangan untuk menggeserkan mata pencaharian penduduk di daerah itu. Pada daerah yang penduduknya belum mengenal cara membuat batik, sekolah bisa berinisiatif untuk melatih para siswa dalam kerajinan membatik sehingga lama-kelamaan dikenal penduduk.

Dengan kerajinan tersebut, sekolah mampu berperan sebagai transformator masyarakat sekitarnya. Dan jika program khusus ini direncanakan dan dilaksanakan secara tepat, maka penyesuaian tujuan dan struktur program dengan perkembangan masyarakat, pembangunan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui arah yang benar.

BEBAN BELAJAR SISWA

Salah satu hasil penilaian Kurikulum 1975/1976/1977 menunjukkan bahwa materi kurikulum yang harus disampaikan kepada para siswa terlalu padat. Hal ini berarti beban belajar siswa sangat berat. Oleh karena itu, Kurikulum 1984 seyogyanya tidak mengulangi ketimpangan Kurikulum 1975/1976/1977 ini.

Di berbagai negara, terutama negara-negara maju, jumlah bidang studi relatif sedikit, sehingga para siswa benar-benar mampu menguasai apa yang diajarkan. Yang terpenting adalah bahwa siswa harus menguasai proses memperoleh pengetahuan dan bukan produk pengetahuan. Secara demikian seorang lulusan dibekali kemampuan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan yang telah diperoleh di bangku sekolah.

Struktur program Kurikulum SMA 1984 menunjukkan bahwa jumlah bidang pelajaran masih terlalu banyak, yakni rata-rata 20. Kalau kecenderungan ini berlanjut terus maka dikhawatirkan bahwa ketimpangan Kurikulum 1975/1976/1977 yang telah diperlihatkan oleh hasil penilaian kurikulum bakal tidak dihindari atau dikurangi. Oleh karena itu, hal ini perlu dipertimbangkan dengan saksama sebelum kurikulum baru diberlakukan. Butir-butir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai perbaikan kurikulum sebenarnya menghendaki penyederhanaan kurikulum dan pengurangan beban belajar yang terlalu memberatkan siswa.

LPTK DAN EKSPERIMENTASI

Banyak inovasi pendidikan di Indonesia dimulai dari sekolah-sekolah, sedangkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) hanya mengikuti pembaharuan yang telah dirintis di sekolah. Dengan demikian, LPTK sering ketinggalan dalam mempersiapkan tenaga guru yang sesuai dengan tuntutan di lapangan.

Kenyataan ini tampaknya akan berlaku pula dengan Kurikulum 1984. Satu hal yang jelas ialah bahwa Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa mulai diajarkan sebagai bidang studi baru pada tahun ajaran 1984/1985. Produksi guru sejarah oleh jurusan sejarah pada LPTK sangat rendah sehingga banyak guru yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah terpaksa direkrut menjadi guru bidang studi ini setelah mengikuti penataran singkat. Penekanan yang diperkenalkan ke dalam bidang studi ini belum dikenal oleh LPTK sehingga lembaga ini ketinggalan satu langkah.

Oleh karena itu, berbagai inovasi yang dimasukkan ke sekolah melalui Kurikulum 1984 seyogyanya segera diperkenalkan kepada LPTK agar tidak tertinggal terlalu jauh. Di masa mendatang segala bentuk inovasi seharusnya diawali dari LPTK sehingga pembaharuan itu sendiri tidak selalu menimbulkan gejolak di lapangan.

Berbagai butir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terutama yang dikemukakan pada awal tulisan ini, menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa hasil eksperimentasi melalui sekolah-sekolah PPSP di delapan IKIP hendak diterapkan ke dalam kurikulum baru ini. Hal ini menunjukkan bahwa suatu pembaharuan yang telah dieksperimentasi tak akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada suatu pembaharuan yang dirancang tanpa uji coba dari belakang meja. Beberapa program uji coba melalui PPSP justru membuktikan bahwa beberapa hal baru belum relevan diterapkan dalam kondisi sekolah biasa. Upaya ini justru mencegah penetapan kebijaksanaan yang keliru dan hanya membawa dampak yang merugikan pendidikan.

Berdasarkan pemikiran ini, upaya eksperimentasi seyogyanya tetap dilanjutkan di masa mendatang. Suatu eksperimentasi yang telah selesai dapat saja dihentikan, tetapi eksperimentasi yang lain perlu dilakukan sesuai dengan proyeksi kebutuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, pembaharuan kurikulum senantiasa harus ditunjang oleh berbagai bentuk upaya eksperimentasi. Jika tidak demikian, suatu kurikulum baru tidak akan memiliki dasar argumentasi yang kuat, dasar empirik yang meyakinkan, dan hanya layak disebut kurikulum hasil uji coba dari belakang meja. Kurikulum semacam ini hanya membawa beban tambahan bagi dunia pendidikan, para guru di lapangan, dan para pengelola pendidikan serta menyia-nyiakan kesempatan generasi muda untuk berkembang.

KREATIVITAS GURU

Betapapun sempurnanya sebuah kurikulum tetapi tanpa ditunjang oleh korps guru yang berkemampuan tinggi, maka kurikulum itu tidak akan membawa perubahan-perubahan yang dikehendaki. Peningkatan kemampuan guru sangat dipengaruhi oleh faktor kreativitas guru. Oleh karena itu, kreativitas guru hendaknya diberi peluang untuk disalurkan agar lama-kelamaan dapat semakin meningkat.

Pendayagunaan kreativitas guru merupakan persoalan yang pelik di negara kita. Sistem pengembangan kurikulum pada khususnya dan sistem pengelolaan pendidikan pada umumnya bersifat sentralistis, sehingga berbagai hal diatur oleh Pusat. Akibatnya, masalah-masalah yang bersifat khusus bagi wilayah tertentu kurang tertampung dalam kebijaksanaan umum yang berskala

nasional. Sistem sentralisasi ini memang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang senantiasa harus diperhitungkan dalam mengembangkan bangsa melalui sistem pendidikan. Namun keadaan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kreativitas para guru.

Dalam kerangka sentralisasi, selalu terdapat peluang untuk mendorong kreativitas para guru. Sisi ini adalah penting karena guru adalah faktor kunci keberhasilan pelaksanaan suatu kurikulum. Oleh sebab itu, kurikulum yang disusun dari Pusat hendaknya tidak terlalu mendetail dan tidak mengatur sampai pada segi-segi yang sangat operasional.

Dalam Kurikulum 1984, materi kurikulum hanya terdiri dari konsep-konsep esensial yang diambil baik dari Kurikulum 1975/1976/1977 maupun dari unsur-unsur baru. Kebijakan ini perlu dilaksanakan secara konsekuen. Dalam kurikulum baru ini unsur metode, unsur sumber bahan dan alat, serta unsur evaluasi sebaiknya diserahkan dalam porsi yang lebih banyak kepada para guru di lapangan. Pengisian hal-hal yang lebih terperinci ke dalam garis-garis besar pedoman dari Pusat hendaknya dilakukan oleh para guru yang lebih mengenal kondisi lapangan, kondisi siswa, serta kondisi prasarana dan sarana yang tersedia.

Untuk meningkatkan kreativitas guru, satuan pelajaran yang dirasakan sebagai beban yang lebih bersifat administratif daripada kontributif terhadap situasi belajar-mengajar selama ini hendaknya tidak ditangani seolah-olah sebagai instruksi menteri yang menentukan konduite para guru. Maksud baik satuan pelajaran hendaknya dicapai tanpa sikap otoriter dari kepala sekolah, penilik, pengawas, dan pengelola pendidikan di kantor wilayah. Sebagai salah satu sarana petunjuk bagi para guru dalam mempersiapkan pelajaran, satuan pelajaran hendaknya tidak ditentukan secara kaku dari Pusat. Satuan pelajaran itu sendiri tidak perlu terlalu mendetail sehingga para guru hanya tinggal meniru atau bahkan membeli satuan pelajaran siap pakai yang disusun oleh kelompok guru tertentu.

Untuk menyalurkan dan meningkatkan kreativitas guru, sekolah sebagai lembaga dan guru sebagai pribadi seyogyanya didorong untuk membuat eksperimen terutama dalam proses belajar-mengajar. Prestasi sebuah eksperimen yang dilakukan seorang guru atau sebuah sekolah dengan sendirinya akan menarik perhatian guru-guru dan sekolah-sekolah yang lain, sehingga akan mendorong mereka untuk meniru prestasi rekannya atau bahkan merangsang kompetisi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan peluang eksperimen ini, penulisan buku-buku pelajaran dan buku-buku sumber yang lain lebih baik diserahkan kepada para guru di

lapangan. Mereka lebih mengenal daya serap, bahasa dan kebutuhan para siswa, serta sarana yang tersedia di sekolah. Ini menyangkut kebijaksanaan penulisan buku di masa mendatang.

PENGELOLAAN GURU

Pengelolaan guru terutama berkenaan dengan guru-guru Sekolah Dasar juga merupakan suatu masalah pelik dalam dunia pendidikan di tanah air kita. Korps guru sebaiknya dikelola di bawah satu tangan dengan garis komando tunggal. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional yang akan datang diharapkan dapat turut menunjang maksud ini.

Suatu sisi yang sangat sulit dalam kerangka pengelolaan guru ini ialah masalah kesejahteraan guru. Guru yang kurang sejahtera tidak mungkin akan melaksanakan kurikulum dengan baik. Oleh karena itu, kebijaksanaan pengelolaan guru di masa mendatang hendaknya diarahkan pada upaya untuk mencari jalan pemecahan guna menanggulangi masalah kesejahteraan guru yang sudah cukup berlarut-larut selama ini. Berkenaan dengan masalah perumahan, dalam kesempatan untuk mendapatkan fasilitas perumahan yang dibangun atas prakarsa pemerintah dan Bank Tabungan Negara para guru perlu lebih diperhatikan. Pengadaan dan pengelolaan koperasi para guru yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru perlu didorong dan diawasi. Sistem penghargaan atas dedikasi dan prestasi para guru perlu dibenahi agar mereka yang layak mendapatkan penghargaan dapat menikmatinya. Selain itu, perlu dipertimbangkan cara menghimpun dana kesejahteraan guru dalam skala wilayah dan skala nasional. Dana kesejahteraan guru ini dapat dikelola dengan menabung dana pada bank-bank yang terpercaya dan/atau menyalurkannya melalui mekanisme sertifikat Danareksa yang sedang digalakkan pemerintah. Dalam hal ini, dana itu tentu tidak bersifat pribadi melainkan merupakan dana bersama milik para guru sebagai kelompok. Dana kesejahteraan ini dapat dikumpulkan melalui pengalihan persentase tertentu dari SPP para murid, sumbangan dunia usaha, dan sumbangan masyarakat pada umumnya. Bunga atau dividen dari modal yang ditabung ini secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas dapat dimanfaatkan untuk memberikan tunjangan tambahan bagi para guru. Tunjangan ini dapat membantu meningkatkan penghasilan guru agar mereka mampu mempertahankan standar kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dengan demikian, prestise guru tidak semakin merosot dari hari ke hari.

KEPALA SEKOLAH

Peranan kepala sekolah merupakan faktor penentu terlaksananya proses belajar-mengajar. Kepala sekolah adalah pemimpin staf guru dari jam ke jam dan dari hari ke hari. Kreativitas para guru akan terhambat jika kepala sekolah tidak terbuka terhadap pembaharuan. Betapapun sempurnanya suatu kurikulum, tetapi jika kepala sekolah tidak bersifat inovatif, maka kurikulum hanya dilaksanakan ala-kadarnya tanpa semangat yang diperlukan untuk mempertahankan momentum pelaksanaan kurikulum.

Oleh sebab itu, sistem senioritas dalam pengangkatan kepala sekolah perlu ditinjau lagi. Dalam sistem seperti ini, seorang kepala sekolah yang telah diangkat dapat bertahan sampai tiba waktu pensiunnya, kecuali jika ia dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Sistem pengangkatan dekan pada fakultas di perguruan tinggi sebenarnya bisa diterapkan pada sekolah dasar dan menengah. Seorang dekan yang tidak dipilih lagi oleh staf dosen menjadi orang biasa atau dosen biasa tanpa merasa gengsinya menurun. Oleh karena itu, sistem bergilir untuk menjadi kepala sekolah perlu diterapkan berdasarkan pemilihan staf guru seluruhnya. Dengan demikian, para guru diberi kesempatan untuk melatih diri dalam segi kepemimpinan, tanggung jawab, inisiatif dan kreativitas, serta pengenalan dan penghayatan suka-duka sebagai kepala sekolah. Melalui cara ini, semangat dalam mengelola sekolah dapat dipertahankan, sebab seorang yang terlalu lama menjabat sebagai kepala sekolah lama-kelamaan bisa kehilangan visi yang baru dan segar.

PENILIK DAN PENGAWAS

Penilik untuk Sekolah Dasar dan pengawas untuk Sekolah Menengah merupakan satu faktor penentu kelancaran pelaksanaan kurikulum. Mereka adalah pengawas yang berfungsi untuk membantu para guru guna meningkatkan kegiatan belajar-mengajar.

Di negara-negara maju peranan supervisor telah terbukti sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas sekolah, kualitas lulusan, melalui program bantuannya bagi para guru. Di negara kita tradisi inspeksi yang panjang belum dapat diubah ke arah kegiatan supervisi yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kemampuan profesi mengajar.

Pada waktu mendatang kebijaksanaan supervisi melalui peranan penilik dan pengawas ini perlu lebih diperhatikan. Jumlahnya yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah guru yang amat banyak dan tersebar sampai ke pelosok tanah air menghambat kelancaran program supervisi yang sebenar-

nya. Para pengawas di kantor wilayah perlu disebarkan sampai ke tingkat yang lebih bawah agar mereka mampu memonitor apa yang sebenarnya terjadi dalam ruang-ruang kelas.

Para penilik dan pengawas adalah perantara para guru dan kepala sekolah di satu pihak dengan para pengelola pendidikan di kantor-kantor pendidikan di pihak lain. Aspirasi dari bawah yang berasal dari sekolah dapat diserasikan dengan tuntutan dari atas yang berasal dari pengelola pendidikan oleh para penilik dan pengawas. Mereka berperan sebagai "penyambung lidah" para guru dan kepala sekolah sekaligus motivator kebijaksanaan dari atas. Selain itu, mereka berperan sebagai wadah penyalur berbagai pembaharuan dalam lingkungan pendidikan khususnya dan lingkungan masyarakat umumnya.

Untuk meningkatkan kualitas guru, para penilik dan pengawas hendaknya mendayagunakan berbagai kemungkinan yang ada. Mereka dapat membantu para guru dengan memperkenalkan buku-buku baru yang bermanfaat bagi proses belajar-mengajar, mengusahakan kelancaran penyaluran buku-buku perpustakaan ke sekolah, menyampaikan pesan-pesan kependidikan melalui buletin supervisi, dan mencari jalan keluar agar sekolah mampu berlangganan majalah-majalah ilmiah dan surat kabar. Selain itu, mereka bisa mengusulkan para guru yang potensial untuk mendapatkan tugas belajar pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan di dalam negeri dan bila perlu di luar negeri.

Yang terpenting adalah bahwa mereka dapat membagi waktu untuk mengunjungi sekolah secara periodik. Melalui kunjungan seperti ini, mereka diharapkan mampu mendeteksi kebutuhan dan harapan para guru serta permasalahan yang menyangkut situasi riil proses belajar-mengajar.

LEMBAGA PENGEMBANGAN KURIKULUM

Di berbagai negara maju, lembaga pengembangan kurikulum dalam skala nasional berdiri sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada menteri pendidikan. Lembaga pengembangan kurikulum ini memiliki perangkat keras yang diperlukan, staf yang memiliki kualifikasi yang beraneka ragam dan keleluasaan untuk mengadakan uji coba kurikulum sebelum diterapkan secara nasional.

Di negara kita, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan merupakan salah satu pusat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu direktorat-direktorat dan kantor wilayah memiliki bagian atau seksi kurikulum. Penilaian kurikulum dan pelaksanaan uji coba diadakan secara pe-

riodik untuk menyusun suatu kurikulum baru. Dengan memperkirakan beban tugas di masa yang akan datang, sejak sekarang perlu dirintis peningkatan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan untuk menjadi satu lembaga yang berdiri sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada menteri.

Kemudian lembaga pengembangan kurikulum ini diharapkan mampu menjangkau pengembangan kurikulum dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan, termasuk kurikulum perguruan tinggi. Dengan demikian, secara nasional terdapat satu penanggung jawab pengembangan kurikulum dalam pengambilan kebijaksanaan pengembangan kurikulum secara menyeluruh. Bagian atau seksi kurikulum yang tersebar di berbagai direktorat dan kantor wilayah merupakan aparat yang bertanggung jawab dalam menjabarkan kebijaksanaan yang bersifat umum dari lembaga pengembangan kurikulum dan mempersiapkan aspek-aspek teknis pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. Dengan demikian, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dapat ditangani sebagai satu sistem yang serasi dan terpadu.

PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN

Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diharapkan dalam tahun 1984 ini kita telah memiliki satu Undang-Undang Pokok Pendidikan. Undang-Undang ini akan menjadi payung untuk Undang-Undang Organik yang lain, seperti Undang-Undang Wajib Belajar, Undang-Undang Pendidikan Dasar, Undang-Undang Pendidikan Menengah, Undang-Undang Pendidikan Kejuruan, dan Undang-Undang Perguruan Tinggi.

Maka hak dan kewajiban masyarakat dalam membangun sekolah diharapkan dapat diatur secara jelas, sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam pendidikan anak-anaknya. Melalui mekanisme hukum ini, berbagai kebijaksanaan pendidikan diharapkan dapat ditampung secara tepat sehingga tidak terlalu sering terjadi perubahan kebijaksanaan pendidikan secara mendasar yang menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Payung kebijaksanaan yang menyangkut kurikulum ini juga diharapkan dapat diwadahi, sehingga pengembangan dan pembinaan kurikulum tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kebijaksanaan strategik dalam pengembangan kurikulum seyogyanya tertampung dalam perangkat hukum ini, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih operasional dalam jangka waktu pendek dapat dijabarkan dari ketentuan-ketentuan strategik yang berlaku dalam jangka waktu yang lebih panjang.

PENUTUP

Dalam tulisan ini penulis telah mengemukakan beberapa pandangan yang langsung dan tak langsung berkaitan dengan Kurikulum 1984, yaitu faktor manusia pelaksana kurikulum, lembaga pengembangan kurikulum, dan perundang-undangan pendidikan. Gagasan-gagasan dalam tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran dalam penggarapan Kurikulum 1984 dan pelaksanaannya di lapangan. Gagasan-gagasan yang dilontarkan tidak berdasarkan prinsip-prinsip teoretik dari buku-buku teks dan buku-buku sumber lainnya, tetapi berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang menyangkut kurikulum yang dirasakan bersama.

Pendidikan dan Lapangan Kerja: Beberapa Asumsi Umum

Mark BLAUG*

Sekiranya masalah lapangan kerja diteropong dari segi kemiskinan penduduk pada umumnya, maka akan sulitlah kiranya untuk mengetahui apa saja yang dapat diperbuat oleh Departemen Pendidikan guna mengatasi masalah tersebut. Pendidikan memang dapat merupakan suatu investasi guna meningkatkan kemampuan produktif di masa mendatang. Namun sejauh dapat diketahui di masa dekat ini hanya mereka yang berpendidikan sajalah yang akan meraih keuntungan. Masih diperlukan waktu beberapa generasi untuk dapat merasakan manfaat dari pendidikan bagi masyarakat lainnya, apabila standar hidup masyarakat itu sendiri meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah mereka yang memperoleh pendidikan. Apabila kebijakan di bidang pendidikan dijadikan sarana untuk mengatasi masalah kemiskinan maka agaknya satu hal saja yang perlu dilakukan ialah: didiklah sebanyak mungkin manusia. Namun akibat dari kebijakan tersebut baru akan terasa 20 sampai 30 tahun kemudian. Sementara itu dana yang dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan akan terlebih dahulu menyita aneka sumber yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas di bidang lainnya atau boleh jadi untuk menciptakan lapangan kerja baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Karena itu kadang-kadang dapat dikatakan bahwa kebijakan untuk tidak mengembangkan pendidikan dapat merupakan cara yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Jadi dalam arti luas suatu perencanaan pendidikan yang diarahkan untuk mengatasi masalah lapangan kerja mau tak mau harus menjawab pertanyaan bagaimana menentukan skala pendidikan yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kelihatan semakin membengkok apabila dikaitkan-dengan segi yang lebih sempit lagi ialah bagaimana mengatasi masalah lapangan kerja.

*Saduran tulisan Mark BLAUG dalam *The Education Dilemma, Policy Issues for Developing Countries in the 1980's*, John Simmons (ed.), The World Bank.

Lagipula masalah isi maupun mutu pendidikan itu sendiri setidaknya-tidaknya sama pentingnya dengan masalah skala.

TUJUH ASUMSI UMUM

Di sini akan kami tinjau tujuh asumsi yang sudah umum diterima mengenai peranan pendidikan dalam mengatasi masalah lapangan kerja. Asumsi-asumsi tersebut berlaku di negara mana saja dan kapan saja ada konperensi membahas masalah-masalah negara berkembang.

1. Pendidikan Meningkatkan Volume Lapangan Kerja

Memang benar sekali kalau dikatakan bahwa dalam jangka pendek pendidikan meningkatkan lapangan kerja, dalam arti bahwa pendidikan itu sendiri merupakan suatu industri padat karya. Dalam jangka panjang hal itu mungkin juga benar sekiranya pendidikan dilihat sebagai semacam investasi sosial yang membuat orang lebih produktif. Namun dengan cara bagaimana pendidikan tersebut dapat meningkatkan produktivitas? Orang boleh mengatakan bahwa pendidikan memberikan kepada anak ketrampilan tangan dan mekanik yang tidak dapat diperolehnya di tempat lain. Walaupun pendapat seperti itu mungkin benar untuk beberapa pekerjaan tertentu namun secara umum hal tersebut tidaklah tepat. Mampukah sekolahan menanamkan nilai dan sikap pembangunan? Sekiranya pertanyaan itu tak terjawab maka dengan sendirinya tidak jelas juga apakah dengan diperbanyaknya pendidikan akan meningkat pula penanaman nilai-nilai yang tepat. Jika sekolah hanya bertugas untuk membuang sikap dan dorongan naluriah anak maka kiranya lebih baik dan lebih murah apabila orang menyeleksi mesin daripada penyeleksi sistem pendidikan. Dengan kata lain asumsi ini dapat menyesatkan kecuali kalau dapat ditentukan terlebih dahulu tenggang waktunya (untuk jangka pendek atau panjang). Pendapat bahwa pendidikan merupakan suatu investasi sudah pula terbahas.

Asumsi tersebut dapat pula ditafsirkan secara lain yakni bahwa manusia terdidik mampu lebih berhemat dan mampu menabung lebih banyak, dan mereka cenderung untuk menyerap benda dan jasa yang padat karya. Secara teoretis dapat dikatakan bahwa dengan cara itu dapat dibuat investasi tambahan yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Boleh jadi ada hubungan antara pendidikan dan sikap menabung. Namun masalah kemiskinan yang diderita negara-negara miskin bukanlah disebabkan oleh tidak adanya tabungan yang memadai, tetapi lebih ke arah mana tabungan tersebut diinvestasikan. Dan masih harus dibuktikan secara empiris apakah

faktor intensitas yang diakibatkan oleh pola pengeluaran konsumsi tersebut merupakan fungsi dari pendidikan yang ingin dicapai konsumen.

2. Pendidikan akan Menghapuskan Kemiskinan

Ditinjau dari jangka panjang, asumsi bahwa pendidikan akan menghapuskan kemiskinan sebenarnya hanya merupakan penegasan kembali asumsi pertama. Memang asumsi tersebut benar dalam arti pendidikan mampu mengurangi angka kelahiran baik secara langsung melalui pendidikan terhadap para ibu maupun secara tidak langsung dengan memperpanjang periode ketergantungan anak pada orang tua mereka. Semakin rendah laju pertumbuhan penduduk, semakin tinggi angka pendapatan per kapita. Lagi pula pendidikan merupakan pelengkap yang perlu untuk menunjang program kesehatan dan gizi. Hal tersebut secara langsung akan menghapuskan akibat-akibat dari kemiskinan. Namun argumentasi ini tidak menunjukkan apa-apa. Bahkan sekiranya dikatakan bahwa antara pendidikan dan keluarga kecil ada hubungan sebab-akibat, kuat-lemahnya hubungan tersebut masih harus diuji terlebih dahulu sekiranya orang harus memilih antara meningkatkan jumlah pendidikan atau menemukan cara-cara lain untuk mengekang pertumbuhan penduduk.

Asumsi tersebut dapat ditafsirkan secara lain yakni bahwa pendidikan memang perlu untuk mengisi kekurangan tenaga kerja yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Namun kini tidak ada lagi contoh-contoh keadaan seperti itu di dunia ini yang dapat menunjang pemikiran yang begitu untuk memperluas pendidikan. Bahkan contoh-contoh yang diajukan ternyata palsu. Jika suatu industri konstruksi kekurangan tukang las, maka biasanya hal itu disebabkan karena hanya sedikit sekali tukang-tukang las yang memperoleh gaji yang sesuai sebagai tukang las. Seseorang baru dapat dianggap sebagai tukang las kalau dia sudah menjalani masa magang selama lima tahun, atau karena peralatan las tidak dapat didatangkan dari luar negeri berhubung adanya pengendalian devisa, atau barangkali karena yang dibutuhkan bukanlah sekedar tukang las namun tukang-tukang las yang ahli. Dengan sendirinya masalah tersebut tidak dapat dipecahkan hanya dengan mendidik lebih banyak lagi orang untuk menjadi tukang las.

3. Pendidikan Justru Menciptakan Pengangguran

Dipandang sepintas lalu, asumsi seperti itu jelas salah. Namun apa yang dimaksud di sini ialah bahwa pendidikan justru membuat orang tidak dapat dipekerjakan: pendidikan meningkatkan aspirasi orang yang terdidik sehingga

mereka tidak mungkin lagi terpuaskan; pendidikan memberi mereka ketrampilan yang keliru dan sikap-sikap yang salah. Jelaslah ada sesuatu yang terungkap dalam argumentasi tersebut namun titik pandangan mengenai aspirasi tersebut tepat sekali apabila dilihat dari segi seluruh proses perkembangan. Diandaikan bahwa suatu negara tidak memiliki sistem pendidikan apa pun maka dapat dipastikan bahwa orang nantinya akan mengeluh "negara ini miskin karena memang tidak berminat memperbaiki diri sendiri." Adakah sebenarnya suatu sistem pendidikan (di mana pun saja) yang mampu membangkitkan harapan untuk memperoleh pekerjaan sedemikian rupa hingga cukup menghasilkan lulusan yang berambisi yang nantinya cukup terpuaskan karena adanya lapangan kerja yang memadai?

Sekiranya ketrampilan dan sikap yang dihasilkan oleh sistem pendidikan sekarang ini dirasa kurang memadai, apa yang kiranya harus diubah? Jelaslah dengan sendirinya bahwa titik berat haruslah diletakkan pada masalah ketrampilan kerja dan penanaman sikap mandiri. Namun apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan ketrampilan kerja? Apabila yang dimaksudkan dengan ketrampilan adalah ketrampilan yang siap pakai, maka pastilah akan lebih baik apabila ketrampilan tersebut diraih sewaktu bekerja. Bukankah itu malahan merupakan dasar yang mempercepat latihan kerja? Jika demikian halnya maka hal itulah yang justru ingin diberikan oleh sekolah. Mengenai masalah kemandirian, tak seorang pun yang berhasil menemukan suatu cara untuk menanamkan sikap mandiri kendati pendidikan tradisional jelas memang belum berhasil.

4. Pendidikan Mengubah Setengah Pengangguran Menjadi Pengangguran Terbuka

Dalam masyarakat pedesaan yang masih tradisional, suatu pekerjaan biasa dibagi antar sesama anggota keluarga di mana masing-masing anggota barangkali hanya memperoleh pekerjaan yang lebih sedikit/kecil daripada yang dikehendakinya. Dengan adanya pendidikan orang jadi terdorong untuk meninggalkan kelompoknya dan beralih ke sektor kota yang modern di mana suatu jenis pekerjaan yang sama dikerjakan oleh sedikit orang sehingga orang lainnya dibiarkan menganggur. Ini berarti bahwa apabila dalam suatu masyarakat yang miskin penduduknya semakin terdidik maka akan semakin banyak jumlah orang yang terang-terangan diketahui menganggur.

Asumsi ini benar namun terlalu umum. Pendidikan memang merangsang orang untuk melarikan diri dari pertanian, karena orang tua yang mengirim anaknya ke sekolah juga sama tergerak untuk menyuruh anak mereka mencari pekerjaan di kota. Dengan adanya pendidikan orang menjadi semakin me-

nyadari akan kemungkinan memperoleh penghasilan lebih apabila bekerja di kota bahkan tersedia kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi pekerja penggal waktu (part-timer) sambil terus berusaha untuk dapat menjadi pekerja purna waktu (lembur). Kota-kota di Afrika dan Asia secara kurang tepat digambarkan sebagai kota modern; dalam sektor kota tingkat menengah biasanya sudah ada suatu pembagian kerja dan ada banyak kesempatan untuk menjalani masa magang. Lagipula, yang mengubah keadaan setengah menganggur menjadi suatu pengangguran terbuka bukanlah melulu pendidikan namun seluruh proses pembangunan. Masalahnya yang utama di sini ialah bahwa pendidikan menyerap sumber-sumber daya yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi pengangguran yang menderita oleh kaum terdidik merupakan masalah yang lebih serius jika dibandingkan dengan pengangguran terbuka.

5. Pendidikan Hanyaah Bagian dalam Pertarungan Memperebutkan Jabatan-Jabatan Top yang Terbatas

Para pengusaha lebih senang mempekerjakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, tidak peduli apakah pendidikan yang lebih tinggi tersebut memang benar-benar dibutuhkan dan efisien untuk menduduki jabatan yang tersedia. Karena itulah para siswa jadi tergerak sekali untuk memperoleh pendidikan tambahan agar mampu bersaing dengan lebih baik dalam kesibukan yang tiada hentinya ini. Namun karena pendidikan itu sendiri tidak membuat mereka lebih produktif maka dengan sendirinya pendidikan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap seluruh output ataupun seluruh lapangan kerja.

Sekiranya isi pendidikan dirasa kurang relevan dan karenanya membuat orang tidak dapat dimanfaatkan untuk menduduki suatu jabatan, mengapa pula para pengusaha begitu menyolok melalap tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi? Dalam masalah ini boleh jadi malahan pemerintah sendirilah yang dapat dibilang merupakan pengusaha yang paling tidak rasional. Apakah pendidikan tersebut relevan untuk jabatan administratif namun sama sekali tidak relevan untuk mendayagunakan industri semaksimal mungkin? Mengapa pula kalangan industri enggan meningkatkan mutu karyawannya yang kurang pendidikan dengan memberi mereka beberapa latihan kerja? Sekiranya memang ada latihan-latihan kerja semacam itu, mengapa pula mereka itu lebih senang melatih orang yang sudah terpelajar dan bukannya mereka yang menurut hasil test kemampuan terbukti mampu untuk dilatih guna menjalankan suatu tugas? Pendek kata asumsi nomor 5 ini terlampau ekstrem untuk pantas ditelaah lebih mendalam.

6. Subsidi Pemerintah untuk Mengembangkan Pendidikan Selalu Mengakibatkan Membanjirnya Permintaan Akan Pendidikan dan Dengan Sendirinya Mengakibatkan Pula Melimpahnya Tenaga Kerja yang Terdidik

Asumsi ini hanya ingin mengungkapkan bahwa hanya orang berpendidikan sajalah yang pada akhirnya mampu meraih berbagai keuntungan dari pendidikan. Keuntungan tersebut misalnya berupa upah yang lebih tinggi dari lainnya, padahal harus diingat bahwa pada garis besarnya pendidikan merupakan beban yang dipikul oleh seluruh masyarakat. Karena itu pendidikan lanjutan merupakan suatu investasi yang lebih banyak dinikmati oleh orang perorangan dan sama sekali kurang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Tambahan pula dengan makin jelasnya berapa besar dana yang diperuntukkan untuk menggaji para karyawan, semakin besar pula keuntungan yang dapat diraih oleh oknum-oknum yang berhasil memperoleh pendidikan tambahan dan dengan demikian semakin besar pula permintaan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Jalan keluar untuk memecahkan masalah itu kiranya sudahlah jelas, yakni dengan lebih membebaskan biaya pendidikan kepada para siswa itu sendiri beserta orang tua mereka. Masyarakat kiranya perlu juga diberi penerangan mengenai besarnya jumlah orang-orang terdidik yang masih belum memiliki pekerjaan.

Apa yang diceritakan di atas memang benar, namun belum mengungkapkan seluruh permasalahan. Sekiranya pasaran tenaga kerja dapat berjalan lancar dan kurang lebih bersifat spontan maka sudah pasti pasaran tenaga kerja akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dengan menghapus segala perbedaan gaji antara mereka yang lebih terdidik dengan yang kurang terdidik.

Sekiranya pasaran tenaga kerja kurang lancar jalannya maka akan ada saja orang yang terdidik namun menganggur kendati pendidikan ditunjang oleh subsidi pemerintah seperti halnya kasus di Pilipina. Jadi masalah pengangguran yang dialami orang-orang terdidik harus diatasi melalui kebijakan-kebijakan di bidang pembiayaan pendidikan maupun pasaran tenaga kerja.

7. Pengangguran Kaum Terpelajar Merupakan Akibat dari Adanya Perbedaan Gaji yang Terlalu Menyolok yang Dilakukan Demi Kepentingan Golongan Elite yang Memegang Peranan

Sistem perbedaan gaji yang terjadi di negara-negara berkembang terlalu menyolok menurut ukuran internasional. Di Amerika Serikat penghasilan seorang doktor besarnya 5 kali lipat penghasilan rata-rata pekerja; sedangkan

di India penghasilannya dapat mencapai 20 kali lipat. Perbedaan-perbedaan tersebut sengaja dibuat oleh negara-negara itu sendirinya pada saat mereka merdeka sebagai suatu usaha untuk menarik tenaga kerja kaum sebangsanya. Mereka itu diambil oleh kelompok elite politik yang berpendidikan tinggi dalam rangka usaha sektor pemerintah untuk mengontrol dan mempengaruhi sektor swasta. Hal ini dengan sendirinya merangsang kebutuhan yang tak terpuaskan di kalangan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai hasilnya akan muncul sejumlah tenaga kerja terdidik yang menganggur karena berbagai sektor pemerintah sudah tidak mampu lagi menyerap tenaga-tenaga terdidik tersebut.

Asumsi tersebut mendasarkan pemikirannya pada apa yang dialami oleh beberapa bekas jajahan Inggris di Afrika. Semuanya itu, dengan perubahan sedikit di sana-sini kiranya sesuai dengan apa yang dialami oleh negara-negara di Asia. Asumsi tersebut menggantungkan argumentasinya pada apa yang dianggapnya sebagai perbedaan gaji yang terlampau besar. Namun dengan mengadakan perbandingan di dunia internasional sebenarnya tak ada bukti apa pun yang dapat diperoleh kecuali apa yang sudah dikatakan terungkap dalam teori ekonomi bahwa faktor kelangkaan memang secara relatif menaikkan harga. Lagipula di India kaum cendekiawan merupakan kelompok yang masih lebih langka jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Walaupun demikian sistem yang dianut negara-negara berkembang untuk membedakan gaji atas dasar pendidikan adalah terlalu berlebih-lebihan. Dari adanya sejumlah golongan cendekiawan yang menganggur dapat diambil kesimpulan bahwa ada lebih banyak pencari kerja yang sekedar ingin memperoleh gaji daripada lowongan yang ada. Namun semboyan "kurangi perbedaan gaji" juga tidak dengan sendirinya akan memecahkan masalah. Apa yang membuat jenjang perbedaan gaji tersebut tetap tinggi? Kebijakan pemerintahkah? Jelas tidak semua negara mengambil kebijakan seperti itu karena banyak di antaranya yang justru penentuan gaji karyawannya banyak diputuskan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kiranya masih banyak hal yang perlu diketahui mengenai masalah penggajian baik yang dilakukan oleh sektor pemerintah maupun swasta di negara-negara berkembang.

EKSPERIMEN DAN RISET

Ada banyak usul yang diajukan untuk merombak pendidikan namun usul-usul tersebut kurang didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Beberapa di antara usul-usul tersebut masih harus diuji dahulu, misalnya: menyusun kurikulum yang mampu menunjang kebutuhan akan lapangan kerja dan kebutuhan pedesaan; menghapuskan ujian; menyaring siswa menurut kuota geografis dan sosialnya; melaksanakan prinsip "perbedaan kerja" dalam masa

sesudah wajib belajar; lebih memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membina pendidikan non-formal daripada pendidikan formal; mengurangi perbedaan-perbedaan penghasilan sesuai jenjang; mengambil tenaga baru pegawai negeri tanpa memperhatikan ijazah mereka atau menaikkan pangkat mereka atas dasar jasa yang mereka hasilkan dan bukan atas dasar usia dan pendidikan; menaikkan uang sekolah untuk menutupi seluruh ongkos pendidikan dan menyesuaikan beasiswa melulu atas dasar penghasilan orang tua; mengganti bantuan dan beasiswa pada jenjang pendidikan tinggi menjadi suatu pinjaman. Di dunia ini memang sudah ada bukti yang dapat menunjukkan hasil-hasil nyata pelaksanaan usul-usul tersebut seperti kurikulum untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai dan program luar sekolah. Namun umumnya banyak dari usul-usul tersebut yang belum terbukti kebenarannya karena sejauh ini memang belum dilaksanakan.

Hal itu membuktikan bahwa orang memang perlu mengadakan eksperimen. Di negara-negara berkembang para pejabat yang menangani masalah pendidikan perlu diyakinkan bahwa orang tidak mungkin menemukan suatu metoda pendidikan yang benar-benar relevan untuk mengatasi masalah lapangan kerja apabila tidak melaksanakan berbagai eksperimen lapangan yang terkendali. Sayanglah proyek panduan akan menghadapi banyak kesulitan. Memilih sekolah atau sekelompok siswa untuk dijadikan obyek eksperimen akan mengundang kecaman dan tuduhan orang seolah mengadakan diskriminasi atau terlalu menganakemaskan sekelompok orang atau siswa tertentu. Lagipula orang toh tidak mungkin secara konstan menangani faktor-faktor lainnya, dan hal itu pun tentulah menyulitkan orang untuk menilai apakah proyek panduan tersebut berhasil atau tidak. Namun tanpa berani mengadakan suatu eksperimen terlebih dahulu, suatu perombakan di bidang pendidikan memang dapat berhasil atau dapat pula gagal.

KESIMPULAN

Dewasa ini di negara-negara berkembang angka tertinggi pengangguran umumnya diderita kaum muda, bahkan untuk mereka itu pun sebagian terbesar terpaksa lebih dahulu menganggur sebelum memperoleh pekerjaan. Apakah memang sudah begitu polanya? Atau apakah di masa mendatang ini angka pengangguran yang tinggi akan melanda pula tidak hanya orang kelompok usia muda tetapi juga usia yang lebih tua? Dengan kata lain, apakah orang muda yang menganggur itu berbuat demikian karena ingin memperoleh pendidikan tambahan di dalam sistem pendidikan yang berkembang pesat ini? Atau apakah pengangguran tersebut secara tahap demi tahap akan melanda juga orang dari semua kelompok umur dan semua jenjang pendidikan?

Sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas barangkali dapat dikatakan bahwa sekiranya negara-negara berkembang itu mampu mempertahankan laju pertumbuhannya seperti sekarang ini, maka yang terbanyak menganggur nantinya adalah warganya yang berusia antara 15-25 tahun, paling tidak dalam masa dekat sejauh dapat diduga. Sayangnya dewasa ini belum terlihat adanya jalan ke luar yang baik untuk mengatasi masalah pengangguran yang melanda kaum muda dan orang-orang berpendidikan. Bagaimanapun juga dalam sistem pendidikan sekarang ini ada kecenderungan pada jenjang tertinggi pendidikan untuk berkembang lebih cepat daripada jenjang bawah, dan itu harus diubah. Barangkali perubahan tersebut baru dapat dilaksanakan dengan menyusun kembali pola pembiayaan pendidikan digabung dengan campur tangan langsung terhadap pasar tenaga kerja. Namun mengubah kecenderungan-kecenderungan seperti itu artinya memecahkan masalah pengangguran yang diderita kaum terdidik sama saja dengan menciptakan atau memperbesar masalah "lulusan sekolah." Jalan keluar untuk menangani masalah para lulusan sekolah, paling tidak untuk jangka pendek ini, ialah dengan menyediakan pendidikan lepas sekolah. Dalam jangka panjang pemecahan itu dapat berupa perombakan pendidikan dasar dari dalam dengan pembaharuan kurikulum, pembaharuan ujian, dan dengan peningkatan latihan guru. Perubahan-perubahan semacam itu memang harus sabar dan pelan-pelan, karenanya terasa kurang menarik bagi mereka yang menghendaki hasil yang serba cepat atau yang yakin bahwa boleh jadi ada suatu ide cemerlang yang tak terduga sebelumnya yang mampu memecahkan semua masalah tersebut dalam satu malam. Namun seperti terjadi di mana pun, pemecahan terbaik pada akhirnya hanyalah berupa pembangunan masyarakat tahap demi tahap.

Makna Kesejarahan sebagai Penggerak Perkembangan Bangsa

Sunarto NDARU MURSITO*

Apabila kita menyoroti sejenak perjalanan tahun 1983, akan kita dapati dua kenangan yang bisa mengesankan *prestasi sejarah nasional kita yang besar*. Hari kenangan bersejarah tersebut adalah tanggal 23 Pebruari 1983, saat diresmikan selesainya pemugaran candi Borobudur, dan tanggal 20 Mei 1983 sebagai peringatan 75 tahun (tiga perempat abad) semangat Kebangkitan Nasional. Kedua peristiwa ini bila direnungkan sesungguhnya merupakan momentum yang tepat untuk menggugah perhatian nasional guna *meningkatkan "sadar kesejarahan"* di antara bangsa kita yang sedang giat membangun ini.

Dari hikmah arti kesejarahan nasional itu akan dapat dipancarkan inspirasi, pelajaran, atau dorongan untuk memacu dinamika bangsa dalam perkembangan lebih lanjut, terutama demi memupuk daya juang dalam pembangunannya. Pada khususnya dari wawasan kesejarahan bangsa ini bisa *disadarkan dan lebih diperkaya* dalam hal identitas, kepribadian, serta integritas bangsa menuju perwujudan cita-cita nasionalnya. Sebab apabila bangsa kita tidak pernah mendalami makna kesejarahan nasionalnya, niscaya disia-siakanlah *berbagai pengalaman dan kekayaan lahir batin* yang pernah mampu disandangnya.

Oleh karena itu, kita perlu menyelami kekayaan kesejarahan bangsa kita, pertama dengan menelusuri prestasi budaya dan ideologi sejarah nasional, kedua secara filsafati memahami arti atau makna kesejarahannya, dan ketiga membahas perihal tantangan nasional untuk melanjutkan prestasi-prestasi bangsa yang pernah dicapai.

*Staf CSIS.

PRESTASI BUDAYA DAN IDEOLOGI SEJARAH NASIONAL

Guna menyelami berbagai pengalaman dan kekayaan lahir batin yang mampu diraih oleh sejarah bangsa kita, kiranya cukup memadai melalui ulasan mengenai arti karya candi Borobudur dan gelora semangat Kebangkitan Nasional. Dua momen kesejarahan ini sebenarnya dapat mencerminkan prestasi budaya dan ideologi sejarah nasional kita, yang dapat *mewariskan kesinambungannya* di dalam arah dan dinamika pembangunan bangsa kita dewasa ini. Khususnya ideologi di sini bukanlah seperti yang diartikan Karl Marx yaitu sistem pemikiran yang bertujuan untuk *pembenaran* keadaan kemasyarakatan ataupun sistem pemikiran yang bersifat dogmatik, tetapi diartikan pemikiran sistematis sebagai *operasionalisasi efektif* dari cita-cita nasional.

Boleh dikatakan prestasi budaya Masyarakat Nusantara mencapai suatu puncak atau kristalisasi perkembangannya dengan penciptaan candi Borobudur pada abad ke-8. Hingga kini candi tersebut merupakan peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Tidak disangsikan lagi bahwa dalam wujudnya yang utuh candi Borobudur adalah hasil karya yang indah, megah, gemilang, agung, penuh pesona rohani, menakjubkan, dan orisinal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa *bangsa yang membangunnya* telah mencapai tingkat *peradaban yang tinggi, teratur, dan mandiri* baik dalam bidang kemasyarakatan, perekonomian, hukum, kesenian, maupun dalam bidang Ketuhanan.

Dunia internasional pun mengagumi candi Borobudur dan bahkan menyatakannya sebagai salah satu keajaiban dunia, yang bukan hanya milik bangsa Indonesia saja melainkan juga merupakan warisan sejarah untuk umat manusia. Dengan demikian candi Borobudur bukan hanya kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, umat beragama Buddha, dan bangsa Indonesia, tetapi juga *suatu permata budaya* milik semua bangsa. Betapa tinggi nilai candi Borobudur kita itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa ia disejajarkan dengan keenam bangunan keajaiban dunia lainnya yaitu piramida Mesir, taman bergantung Babilonia, tembok raksasa Cina, musolium Taj Mahal di India, menara Pisa di Italia, dan menara Eiffel di Perancis.

Ternyata candi Borobudur itu mencerminkan banyak prestasi ulung dari nenek moyang kita, karena memang mengungkapkan *berbagai prestasinya yang lain*. Di antaranya ialah budaya bahari dan jiwa niaga berupa pengetahuan serta ketrampilan menjelajahi samudra raya dan berdagang dengan negeri-negeri yang jauh, seperti ditunjukkan dalam salah satu relief candi Borobudur yang menggambarkan kapal niaga mereka. Demikian juga tertib hukum yang penuh disiplin sudah dikenal pada jaman Ratu Syima di kerajaan

Mataram Hindu. Hanya tertib hukum dan keadaan sosial ekonomi yang tangguhlah memungkinkan nenek moyang kita membangun Borobudur dan candi-candi megah serta indah lainnya. Selain itu adalah prestasi besar dan orisinal pula bermacam-macam kesenian kreasi tinggi yang dari saat itu berkembang hingga sekarang, seperti seni pahat, seni ukir, seni batik, seni tari, seni musik instrumental maupun vokal, atau seni sastra.

Secara khusus mengenai seni pewayangan, kebudayaan daerah yang kini sedang dinasionalisasikan dengan pemakaian bahasa Indonesia, terdapat penghargaan tinggi dari para ahli luar negeri, antara lain pengkaji seni budaya dari Uni Soviet yaitu I. Solomonik.¹ Di antara jenis seni pemanggungan tradisional dari India, Thailand, Kampuchea, Cina, dan Iran dinilainya bahwa ternyata wayang kulit (wayang purwa) merupakan pertunjukan yang telah berkembang maju sekali dalam hal teknik dan pemanggungan. Dikatakannya pertunjukan wayang kulit tak ada bandingannya baik menurut arti pentingnya dalam fungsi sosial maupun menurut volume kedalaman seni yang bersegi banyak: drama, kesusastraan, lukis, aneka gaya bicara serta gerak imitasi, dan warna-warni dunia musik yang menakjubkan. Di dalamnya dicerminkan kehidupan masyarakat, adat-istiadat, sistem filsafat, pendidikan, dan hiburan yang mampu menghantarkan segi-segi pemikiran paling halus dan mengundang simpati estetika yang mengasyikkan para penonton. Di Uni Soviet ulasan Solomonik ini disambut hangat oleh para pembacanya, sehingga mereka mengetahui seni beraneka ragam di Nusantara ini dan karenanya sangat ber-simpati pada rakyatnya yang berbakat.

Walaupun cerita wayang bersumberkan buku sastra Mahabarata dan Ramayana dari India, terbukti bahwa cerita pewayangan Indonesia yang demikian mengakar dalam pemahaman rakyat ini mempunyai karakter dan kejiwaan yang berbeda dengan sastra Mahabarata dan Ramayana asli India. Di Indonesia cerita aslinya telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian.² Kemampuan kreatif orang Indonesia di bidang ini pernah dipuji oleh pujangga India, Dr. Rabindra Nath Tagore yang berkunjung ke Jawa pada tahun 1937, bahwa walaupun cerita wayang Mahabarata dan Ramayana berasal dari India, namun kenyataannya orang Indonesia mampu mengembangkannya secara lebih mengagumkan.³

¹S. Zakharov, "Dunia Wayang yang Mengasyikkan" dalam harian *Berita Buana*, 6 Agustus 1983.

²Drs. Soetrisno PH., *Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*, Penerbit Pandawa Yogyakarta, 1977, hal. 83.

³Tajuk harian *Berita Buana*, 16 Pebruari 1984.

Mengenai budaya maritim dan jiwa niaga diketahui dari bukti-bukti sejarah abad ke-15 dan ke-16 yang menunjukkan bahwa masyarakat Jawa justru lebih menyerupai masyarakat kota perdagangan daripada masyarakat pedesaan pertanian. Lebih banyak penduduk tinggal di kota-kota daripada di pedesaan. Kota-kota seperti Tuban, Demak, Banten, Jakarta, Gresik, Surabaya menurut laporan peninjau masa itu *besarnya sudah mirip* kota-kota di Eropa pada jamannya. Kota-kota ini tidak tergantung pada penghasilan pertanian, melainkan hidup dari perdagangan dan pelayaran. Kapal-kapal dari Jawa telah berdagang sampai mengarungi lautan hingga di India, Arab, Timur Tengah, dan daratan Cina.¹

Sementara itu semangat Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 dapat dikatakan telah mampu membangunkan *kesadaran nasional* para perintis gerakan kebangsaan di Nusantara ini. Dari waktu ke waktu berkembang dan meluasnya nasionalisme mereka memancarkan tindakan patriotisme yang semakin menggelorakan *perjuangan lahir batin* demi cita-cita mendirikan negara baru dan membangun bangsa baru. Padahal di masa itu status negeri mereka adalah masyarakat Nusantara yang telah merosot ke tingkat suatu bangsa yang cerai-berai, terpecah-pecah, sangat terbelakang, dan miskin *dalam belenggu penjajahan* Belanda selama beberapa abad.²

Meringkuk dalam jaman penjajahan bangsa asing itu martabat bangsa Nusantara sungguh-sungguh dinistakan: ditindas dan diperbudak yaitu *dieksplorasi sumber daya alam maupun manusianya* untuk peningkatan kemakmuran dan peradaban bangsa penjajah. Dari masa itu cukup dikenal adanya sebutan yang mengatakan bahwa masyarakat Nusantara hanyalah "bangsa kuli." Jika keadaannya terus-menerus demikian, sebagai akibatnya niscaya masyarakat Nusantara ini senantiasa *tergencet kreativitas serta pertumbuhan budayanya* sehingga tetap menjadi bangsa yang sangat terbelakang, miskin, dan terhinakan.

Namun semenjak penampilan pergerakan Budi Utomo 20 Mei 1908, semangat kebangsaan di Nusantara *terus-menerus berkembang*. Cita-cita serta gerakan Budi Utomo menyebarluaskan dan mengembangkan pendidikan bangsa sejalan dengan kegiatan R.A. Kartini yang menekankan pendidikan kaum wanita untuk memajukan peradaban bangsa. Setelah makin banyak warga Nusantara mengecap pendidikan modern maka semakin meluas pengetahuan sosial mereka, menjadi semakin kritis dan kreatif daya pikir mereka.

¹Dr. Onghokham dalam harian *Kompas*, 7 April 1981.

²Uraian lebih lengkap mengenai semangat Kebangkitan Nasional dapat dibaca: Sunarto Ndaru Mursito, "Dari Kebangkitan Nasional Menuju Pembangunan Kesejahteraan Umum" dalam harian *Suara Karya*, 20 Mei 1983.

Dari sini mereka berangsur-angsur meyakini perlunya *upaya politik dan sosial* untuk menggalang kesadaran nasional bangsa terjajah, sekaligus untuk mengobarkan semangat kemajuan bumiputera dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai hasil nyata di antaranya ialah berkembangnya partai-partai politik, perkumpulan-perkumpulan pemuda dan wanita, lembaga-lembaga pendidikan, serikat-serikat buruh atau pedagang.

Kiranya tidaklah berlebihan untuk mengagumi, betapa dalam hal ini masyarakat Nusantara telah menunjukkan kemampuan besarnya. Kegiatan sosial dan politik yang dikembangkan belum sampai lima dasawarsa, ternyata sudah mampu menghasilkan *prestasi nasional yang gemilang*. Nusantara yang dalam dasawarsa pertama abad ke-20 masih tercerai-berai dan sangat terbelakang, *telah dikobarkan kesadaran dan kebangkitan nasional yang bergelora* sehingga dalam dasawarsa ke-5 abad yang sama berhasil menjadi pelopor terandalkan bagi negara-negara berkembang lain, bahkan bagi negara berkembang yang jauh lebih maju.

Pergerakan nasional untuk kemajuan politik, sosial, dan ekonomi yang dikembangkan semenjak Angkatan 1908 terus-menerus meningkat dan mencapai momentum baru pada Angkatan 1928 yang dalam Sumpah Pemuda mengintegrasikan seluruh perjuangan bangsa dengan *membentuk identitas bangsa Indonesia* menuju cita-cita bersama. Dari sini semakin berkembang mantap kesadaran nasional untuk mendirikan *negara baru Indonesia*. Melalui pengalaman dan wawasan semasa pergerakan kemerdekaan berhasil dirumuskan perangkat falsafah politik Pancasila dan konstitusi UUD 1945 untuk membangun *bangsa baru Indonesia* menuju masyarakat adil dan makmur jasmaniah rohaniah.

Pendirian negara baru dan pembangunan bangsa baru Indonesia itu dimaklumkan kepada dunia internasional melalui *Proklamasi Kemerdekaan Indonesia* pada 17 Agustus 1945. Semuanya ini jelas merupakan hasil perjuangan yang berat dan tak kenal menyerah. Kemerdekaan nasional yang lama diimpi-impikan ini harus direbut dan dibela dengan kekerasan dari bangsa penjajah dengan mempertaruhkan segala-galanya sampai tetes darah terakhir. Angkatan 1945 tampil menjadi tulang punggung perjuangan merebut serta membela kemerdekaan bangsa untuk *menegakkan keseluruhan hasil* pergerakan nasional sejauh ini.

Kesemuanya itu menunjukkan betapa semangat kebangkitan nasional yang dirintis pada awal abad ini telah berkobar dan menggelora menjadi nasionalisme maupun patriotisme yang sejati serta ampuh. Cinta bangsa dan tanah air terwujud dalam semangat dan tindakan nyata, menyumbangkan darma bakti demi mendirikan serta menegakkan *negara dan bangsa yang*

merdeka. Betapa tingginya nilai kemerdekaan itu terutama dirasakan oleh generasi lebih tua yang mengalami sendiri bagaimana hina dan sengsaranya menjadi bangsa diperbudak oleh bangsa penjajah. Terutama memang dirasakan betapa terkekangnya prospek kehidupan.

Maka kaum terpelajar kita pada waktu itu umumnya berpendirian bahwa lebih baik menderita dan bahkan mati memperjuangkan kemerdekaan bangsa daripada hidup makmur mengabdikan bangsa penjajah yang ingin melanggengkan pemerasannya. Pendirian yang membara ini juga meluas ke lingkungan masyarakat yang merasa nasibnya diperjuangkan. Dengan demikian *berko-barlah penghayatan kolektif* cita-cita menjadi *bangsa merdeka yang bebas untuk membangun masyarakat adil dan sejahtera*. Secara demikian bangsa Indonesia berhasil memperjuangkan dan membela Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kendatipun semua ini menuntut pengorbanan harta benda, penderitaan, dan bahkan nyawa.

KESEJARAHAN NASIONAL: KESADARAN AKAN DINAMIKA PERKEMBANGAN BANGSA

Dari uraian di atas jelaslah bahwa sebagaimana adanya candi Borobudur memang merupakan harta sejarah dari masyarakat Indonesia kuno. Begitu pula pergerakan Budi Utomo merupakan kegiatan masyarakat kita di masa lalu. Namun demikian, warisan ataupun pengalaman bangsa kita itu *tidak boleh* dianggap dan dijadikan *mutiara masa lampau belaka*, karena dengan cara ini berarti bangsa Indonesia akan buta terhadap sifat kesejarahannya dan melalaikannya. Justru setiap peristiwa penting dalam sejarah kita sebenarnya memberikan pelajaran yang konkrit. Dalam hal ini tetaplah berlaku peribahasa: "Pengalaman adalah guru yang paling baik." Dari *pengetahuan dan pema-haman sejarah* seharusnya *suatu bangsa membuat kesejarahannya*.

Arti kata "sejarah" menurut makna bahasa sebenarnya ialah: (1) peristiwa atau apa yang sudah terjadi; (2) penulisan atau kisah mengenai peristiwa tersebut. Apabila pengertian ini diterapkan untuk memahami "sejarah manusia" tampaknya kehidupan manusia itu menunjukkan kontinuitas peningkatan. Ternyata bahwa hidup manusia mempunyai ciri *perkembangan yang terus-menerus*. Proses perkembangan yang berkesinambungan ini merupakan "*kesejarahan*" yang *dibentuk atau ditentukan* oleh kepribadian manusia itu sendiri sebagai *subyek kesejarahan*. Arti filsafati dimensi kesejarahan ini sebagai faktor realitas yang pokok telah disadarkan oleh filsafat Hegel pada awal abad ke-19, dan sampai dewasa ini merupakan sasaran pemikiran filsafat yang amat penting untuk memahami eksistensi makhluk yang disebut 'manusia.'

Merupakan makna filsafati sadar kesejarahan manusia tidak lain adalah *kesadaran manusia akan dinamika perkembangannya yang terus-menerus*. Kesadaran ini bersifat mengolah keadaan *masa sekarang* dengan memetik hikmah dari *masa lampau* dan mengusahakan kemajuan di *masa depan*, sehingga menjadi modal untuk penyempurnaan lebih lanjut. Maka manusia bukan hanya pasif dilewati waktu, melainkan *aktif mendayagunakan waktunya*: yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa depan untuk perkembangannya. Dengan demikian manusia benar-benar menjadi *subyek yang menyejarah*, jadi bukan hanya terhanyut dalam peristiwa atau hukum alam belaka seperti halnya semua makhluk yang lebih rendah daripada manusia.

Sehubungan dengan kesejarahan manusia ini terdapat tiga corak pandangan yaitu: (1) model siklis; (2) model linear; dan (3) model spiral.¹ *Model siklis* memahami jalannya sejarah adalah sebagai periode-periode yang *terus-menerus berulang* atau repetitif (ciclis = berputar, lingkaran). Di sini peristiwa-peristiwa sekarang dipandang sama sekali sebagai pengulangan-pengulangan dari peristiwa masa lampau. Dan peristiwa di masa lampau itu dipegang sebagai paradigma atau pola bagi peristiwa sekarang. Dengan demikian maka tingkah laku maupun kegiatan sekarang pun menerima nilainya, kalau meniru atau disesuaikan dengan apa yang sudah dipolakan pada masa lalu. Dalam perkembangannya peristiwa yang semakin jauh dari polanya selalu mengalami kemerosotan, lalu keruntuhan, dan akan lahir kembali peristiwa keemasan yang akan merosot lagi; demikian akan berulang terus-menerus. Pandangan seperti ini pada umumnya terdapat di dalam sikap hidup tradisional, yang tidak mau menerima pembaharuan-pembaharuan. Realisasi konkrit penghayatan kesejarahan model siklis ini sedikit banyak terdapat dalam liturgi, dogma, dan hirarkhi.

Sebaliknya dalam *model linear* jalan sejarah dipandang sebagai maju ke depan di mana waktu tidak terulang (linear = lurus). Dinamika sejarah ditandai oleh munculnya hal-hal yang baru. Kesejarahan manusia dipahami *bersifat kreatif dan maju menuju suatu pemenuhan terakhir*. Di sini setiap peristiwa dinilai mempunyai makna pada dirinya sendiri dalam hubungannya dengan yang lain dan tujuan terakhir. Hampir mirip dengan ini ialah *model spiral* yang memandang majunya jalan sejarah tidak lurus tetapi melewati kontradiksi-kontradiksi yang dalam setiap tahap berbeda. *Tiap-tiap kontradiksi* yaitu dari tese menimbulkan antitese akhirnya mencapai sintese, *akan menghasilkan tahap yang lebih tinggi*. Realisasi konkritnya, kesejarahan manusia berlangsung melalui pergolakan-pergolakan dan dari sini mengalami tahap-tahap yang terus-menerus diatasi oleh tingkat yang lebih sempurna.

¹Dr. M. Sastrapratedja, *Catatan Kuliah Filsafat Manusia 1983*, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Kiranya jelas bahwa ketiga corak pandangan tentang kesejarahan manusia di atas masing-masing mempunyai penganut. Bahkan karena begitu ekstrem beberapa orang hanya berpegang teguh pada satu model sejarah belaka secara fanatik. Sebagai contoh, kaum Marxis atau Komunis yang menjadikan konflik atau pertentangan golongan sebagai arah proses sosial menuju pembaharuan atau perbaikan masyarakat. Demikian pula sikap kaum modernis yang menginginkan kebaruan semata-mata, berbalikan dengan kaum konservatif yang bersikap mengagung-agungkan masa lalu. Namun bagi sikap filsafati yang kritis dan lengkap *wajib menerima setiap segi kebenaran* yang disampaikan oleh ketiga model kesejarahan itu demi membangun *kesejarahan yang bijaksana dan terbaik*.

Sehubungan dengan itu sebagai bangsa, di abad mutakhir ini bagaimanapun bangsa Indonesia harus menjalani kesejarahannya. Dia bisa berlaku masa bodoh tidak peduli atau bersantai-santai mengenai kesejarahannya, yang akibatnya dia akan terhanyut dan terseret oleh kesejarahan bangsa lain, atau dia mau memerankan diri sebagai *subyek yang mandiri mengolah dan mendayagunakan kesejarahannya*. Kemandirian bangsa sebagai subyek yang mengolah kesejarahannya ini terungkap dalam kemauan mengambil atau melestarikan hal yang bernilai dari masa lampainya dalam menyelenggarakan peradaban dan membangun kreasi baru di masa sekarang demi meningkat ke masa depan yang lebih baik tanpa takut menghadapi pertentangan yang sering kali tak terelakkan (bandingkan tiga corak kesejarahan di atas).

Tidak disangsikan lagi bahwa kristalisasi dan pemuncakan kultural yang mendasar dari kesejarahan bangsa Indonesia adalah *falsafah negara Pancasila* sebagai ideologi perjuangan bangsa. Butir-butir Pancasila merupakan penemuan atas nilai-nilai unggul budaya bangsa yang disesuaikan dengan dunia modern. Dan nilai-nilai Pancasila ini oleh kesepakatan nasional sampai kini dijadikan pedoman pembangunan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Dewasa ini atau menyongsong abad ke-21 bangsa Indonesia melaksanakan pembangunannya adalah demi menciptakan masyarakat Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh pembangunannya seharusnya merupakan *pengamalan atas nilai-nilai Pancasila itu*.

Sudah pasti *beruntunglah bangsa Indonesia masa kini diwarisi* kesejarahan yang gemilang dari nenek moyangnya. Bukti yang konkrit ialah tidak banyak bangsa di muka bumi ini menerima warisan sebesar dan senilai candi Borobudur atau budaya maritim dan jiwa niaga yang pernah jaya. Terutama mendapat warisan semangat kebangsaan penuh daya juang yang ibaratnya adalah masih embrio dalam masa R.A. Kartini, terlahir sebagai anak kecil pada Angkatan 1908, berkembang menjadi teruna remaja yang mengenal identitas dirinya sebagai bangsa Indonesia pada Angkatan 1928, dan meningkat men-

jadi pemuda dewasa yang sanggup mematahkan belenggu penjajahan pada Angkatan 1945; akhirnya dari keseluruhan angkatan ini mampu mendirikan negara dan bangsa baru siap dengan ideologi pembangunannya. Maka bangsa kita sekarang ini benar-benar *tidak tahu berterima kasih*, seandainya tidak menyambut prestasi ulung dan nilai-nilai cemerlang nenek moyang kita itu dengan meneruskan kesinambungannya dan mendayagunakan makna kesejarahannya.

TANTANGAN MELANJUTKAN PRESTASI GEMILANG BANGSA INDONESIA

Menjelang abad ke-21 ini masyarakat Indonesia sedang berjuang untuk mencapai cita-citanya membangun bangsa besar yaitu masyarakat Pancasila. Berdasarkan bukti-bukti jelas masa lampunya bangsa Indonesia pernah menampilkan diri sebagai masyarakat yang berpotensi besar dan unggul. Perwujudan cita-cita tersebut bukanlah sesuatu khayalan. Tidak diragukan bahwa tanah air kita yang merdeka ini merupakan negara yang potensinya kaya raya dan mempunyai letak geografi yang strategis di antara negara-negara lain.

Namun disayangkan bahwa bangsa Indonesia nyaris menenggelamkan bahtera kesejarahannya. Hampir dua dasawarsa setelah kemerdekaannya, nasionalisme dan patriotisme bangsa yang telah menggelora itu *tidak disalurkan* ke arah pembangunan kesejahteraan berdasarkan cita-cita Pancasila. Justru para pemimpin bangsa dan kaum cerdik pandai mengisi kemerdekaan negaranya dengan mencari kepentingan mereka masing-masing. Dalam kerangka ini mereka saling bersaing memperebutkan dukungan masyarakat. Sebagai akibatnya rakyat menjadi terpecah-pecah, karena mengikuti pengarahannya yang berbeda-beda dan bahkan bertentangan. Nasionalisme dan patriotisme yang telah menggelora *semakin digerogeti* oleh perpecahan dan *makin memudar kobarnya* karena cita-cita pembangunan hanya menjadi janji-janji kosong.

Arus kemerosotan nasional ini dengan baik dimanfaatkan oleh kaum Komunis yang ingin menguasai bangsa kaya potensi ini dalam rangka mengkomuniskan dunia. Justru dalam keadaan negara hampir bangkrut akibat pemberontakan Partai Komunis, sementara pemimpin dan cerdik-pandai Angkatan 1966 menyadari bahaya kehancuran bangsa secara material maupun spiritual. Penumpasan kaum Komunis dan perombakan Orde Lama dipandang sebagai prasyarat untuk mendirikan Orde Baru yang bertujuan *mengembalikan orientasi* kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 yaitu membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dan adil dalam Masyarakat Pancasila.

Semenjak pemerintahan Orde Baru memang rakyat Indonesia mengharapkan supaya pembangunan kesejahteraan umum *segera dilaksanakan* dan agar wujudnya pun semakin tampak. Namun hasil dari hampir 15 tahun pembangunan nasional berencana masih jauh dari memungkinkan segenap warga negara *secara pasti memperoleh* kesejahteraan dan keadilan lahir batin. Harus diakui bahwa baru sebagian warga negara bisa mandiri atau mantap membangun kesejahteraan. Karena peningkatan kesejahteraannya begitu pesat dan kebanyakan hanya *mencari kesejahteraannya sendiri*, maka di mana-mana menggejala jurang kaya-miskin yang lebar dalam masyarakat. Di lain pihak sebagian besar warga negara belum mendapat tempat untuk menyumbangkan kemampuannya secara maksimal bagi pembangunan, sehingga terlalu tertinggal kemajuannya dan bahkan banyak yang tak terjangkau oleh hasil-hasil pembangunan. Pembangunan tidak berhasil sepenuhnya melaksanakan desentralisasi kekayaan masyarakat tetapi justru cenderung menguatkan konsentrasi kekayaan pada warga negara yang sudah kaya.

Selama periode ini agaknya baru tampil *perintis-perintis* pembangunan kesejahteraan dan keadilan. Semangat pembangunan "kesejahteraan umum" *belum meluas* ke segenap bangsa Indonesia, khususnya di antara para pemimpin dan cendekiawan. Jadi keadaannya adalah seperti tahun 1908 ketika baru muncul perintis-perintis semangat kebangkitan nasional. Tetapi jelaslah bahwa kegotongroyongan dan kecintaan bangsa yang merupakan kepribadian dan inti semangat kebangkitan nasional tokoh-tokoh Budi Utomo, mengamatkan kepada setiap warga negara untuk *membangun kesejahteraan umum* dan bukan hanya kesejahteraannya sendiri. Secara konkrit, warga negara masing-masing wajib menanyakan dan melaksanakan apa yang dapat disumbangkannya untuk kesejahteraan *masyarakat yang seluas-luasnya*, sehingga turut bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu kehidupan *sesama warga bangsanya*, terlebih-lebih mereka yang terlantar.

Tak diragukan lagi bahwa para perintis kebangkitan nasional tahun 1908 tidak hanya berjuang untuk kesejahteraan mereka sendiri tetapi untuk kesejahteraan dan keadilan bagi bangsanya. Demikian juga nasionalisme dan patriotisme (yang digelorakan oleh semangat kebangkitan nasional) pada pelopor-pelopor kebangsaan tahun 1928 dan 1945 telah berkobar untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi *segenap warga bangsa* dan bukan untuk mencari kepentingannya sendiri. Maka kemerdekaan bangsa yang telah direbut dengan susah payah oleh hampir seluruh warga bangsa *akan diselewengkan*, jika oleh generasi sekarang kemerdekaan itu *hanya diisi dengan perlombaan untuk mengejar kesejahteraannya sendiri* dan bukan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Lebih durhaka lagi, jika kemerdekaan ini dimanfaatkan untuk mengeksploatasi sesama warga bangsa.

Tendensi kehidupan yang mengejar kesejahteraan sendiri itu pada umumnya adalah gaya hidup *lebih menonjolkan kemajuan ekonomi* dan sangat kurang diimbangi oleh kemajuan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kesosialan, mentalitas, Ketuhanan, moral, dan kesadaran nasional (politik). Gaya hidup ini merupakan akibat peniruan pada peradaban modern Barat. Padahal apabila kita camkan, warisan besar nenek moyang kita *amat menonjolkan spiritualitas* umpamanya bidang-bidang kesenian, kesosialan, mentalitas, moral, dan religi. Sebab itu terasalah pentingnya pengenalan dan pemikiran atas kepribadian bangsa yang tercermin dalam sejarah kemerdekaan, candi Borobudur, dan warisan budaya lainnya demi *memperkuat spiritualitas bangsa* dalam menghadapi dan menyaring peradaban Barat yang bertendensi materialis dan individualis.

Andaikata bangsa Indonesia kurang berminat untuk mendalami, melestarikan, dan meningkatkan nilai-nilai seni, sosial, moral, dan Ketuhanan dari warisan budaya bangsa itu, boleh jadi kebudayaan kita akan dilanda dan digerogoti peradaban asing yang ternyata *menjauhkan dari kesejahteraan yang utuh/seimbang* sebagaimana terlihat di kota-kota besar maupun kecil dan kini makin mempengaruhi pedesaan juga. Kebudayaan bangsa selama ini adalah kaya dengan aspek-aspek kemanusiaan serta kerohanian yang luhur; sudah barang tentu ini *perlu dikembangkan juga* beriringan dengan pengembangan segi kejasmanian yang sedang giat dilancarkan dalam program perluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi. Apabila pembangunan unsur kejasmanian tersebut berkembang begitu pesat *tanpa disertai intensifikasi pembangunan unsur kerohanian* yang umumnya berlangsung lebih lambat, niscaya sejarah perkembangan bangsa kita *semakin terkikis kemanusiaannya* di mana ini akan tercermin dalam fakta kebingasan dan kekerasan sosial yang kini telah menggejala.

Menghadapi masyarakat yang sedang diarahkan menuju ekonomi modern dan industrialisasi, jelaslah di dalam masyarakat nanti akan bermunculan bermacam-macam sektor jasa. Dengan perkembangan peradaban akan terjadi diversifikasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia yang seluas-luasnya. Dalam bahasa ekonominya, kemajuan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan manusia dari kebutuhan primer kepada kebutuhan sekunder dan tersier. Namun demikian peningkatan sektor jasa-jasa ini pasti *tidak cukup* hanya menekankan pengembangan kuantitatif, tetapi juga menuntut *pengembangan kualitatif*. Dalam segi kualitas inilah terasa pentingnya pengisian bobot *kemanusiaan yang mempunyai hati dan kesosialan*, sehingga perbuatan-perbuatan jasa nantinya bukan hanya bernilai lahiriah saja sebagai basa-basi penuh manipulasi dan kemunafikan yang justru bisa mendangkalkan dan memutarbalikkan kepribadian.

Akibat dari pertambahan penduduk yang makin meningkat jelas bangsa kita sedang menghadapi masalah lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan yang tidak semakin ringan. Untuk itu khususnya kecakapan serta ketrampilan nenek-moyang kita menguasai lautan dan berniaga hendaknya segera mendorong usaha peningkatan kecakapan maupun ketrampilan *kebaharian dan kewiraswastaan* bangsa yang sekarang masih sangat kurang. Demikian pula warisan sosial budaya yang amat indah dan orisinal serta alam permai selekasnya menyadarkan masyarakat untuk bersungguh-sungguh mengelola industri pariwisatanya yang masih kecil dan menampilkannya menjadi *negara pariwisata yang terkemuka*.¹

Tiga bidang tersebut sebenarnya merupakan faktor penggerak kemajuan ekonomi yang penting, tetapi justru dalam ketiga bidang itu dirasakan kelemahan. Apabila secara serius dikembangkan, maka kewiraswastaan, kebaharian, dan pariwisata itu bisa menyerap tenaga kerja penganggur dan mengurangi kemiskinan yang memadati sektor pertanian. Wilayah bahari yang amat luas dan bisa menyediakan lapangan kerja dalam bidang perikanan, perkapalan, perindustrian. Pengolahan atau distribusi berbagai sumber daya alam yang luas membutuhkan berkembangnya kewiraswastaan. Begitu juga tumbuhnya sektor pariwisata akan menarik kegiatan sektor-sektor lain dengan jangkauan yang amat luas. Kita hendaknya tidak mengabaikan bidang-bidang itu, sehingga Wawasan Nusantara kita tinggal bagaikan impian, kewiraswastaan di negara kita dinikmati oleh orang asing, dan keindahan negara kita hanya memberi manfaat sedikit.

Sebagai hasil renungan atas prestasi kesejarahan bangsa di atas, wajiblah kita generasi penerus mewarisi dan melestarikan prestasi generasi terdahulu, serta mendayagunakannya untuk kreasi baru demi mewujudkan pembangunan Masyarakat Pancasila. Mengakhiri abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 ini bangsa Indonesia sekarang ditantang untuk *tidak kalah berprestasi* daripada nenek moyangnya masa lalu, yaitu untuk terus-menerus melanjutkan prestasi gemilang mereka. Sudah pasti pembangunan negara Pancasila tidak kalah beratnya dengan pergerakan kebangsaan untuk memerdekakan nusa dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlu dihayati dan dikembangkan daya juang yang ulung dan konsisten dari semangat kebangsaan di negeri ini, yang mulai dibangkitkan dan digelorakan dalam pertengahan pertama abad ini.

Bagaimanapun masyarakat Pancasila (kesejahteraan lahir batin dan keadilan) baru akan terwujud hanya kalau *dilaksanakan pengerahan maksimal*

¹Ulasan lebih mendetil mengenai kepariwisataan dapat dilihat: Sunarto nDaru Mursito, "Mendayagunakan Potensi Pariwisata untuk Pembangunan Nasional" dalam majalah *Analisa*, Juli 1983.

dari potensi bangsa untuk *membangun kesejahteraan umum*. Semakin luasnya dedikasi dan prestasi warga negara untuk pembangunan kesejahteraan itu merupakan satu-satunya upaya untuk terbinanya negara Pancasila. Berkembang atau merosotnya kesejahteraan umum terletak pada partisipasi tiap-tiap warga negara. Oleh sebab itu demi mewujudkan Masyarakat Pancasila yang dicita-citakan, tidak ada pilihan lain kecuali perlu mengobarkan dan menggelorakan *semangat kebangkitan nasional untuk pembangunan kesejahteraan umum* dengan cara membangkitkan semangat setiap warga negara agar suka menyumbangkan apa yang dapat diberikannya untuk kesejahteraan masyarakat yang sebanyak-banyaknya, khususnya mereka yang menderita. Jadi mereka jangan sampai hanya mementingkan kesejahteraannya sendiri, atau lebih jahat lagi: mencari kesejahteraannya sendiri dengan cara mengorbankan kesejahteraan sesama warga bangsa.

Supaya semangat nasional yang membangun kesejahteraan umum *dapat dibangkitkan*, sudah pasti terlebih dahulu dituntut *adanya kepeloporan* terutama dari aparat pemerintah dan kaum cerdik pandai bangsa; seperti halnya selama masa pergerakan nasional semangat kebangkitan nasional untuk pembangunan bangsa juga telah dipelopori oleh lapisan pemimpin dan cendekawan bangsa. Jika suasana kepeloporan semacam ini sekarang tidak ada, jelas semangat nasional untuk membangun kesejahteraan umum sukar dibangkitkan, apalagi dikobarkan dan digelorakan dalam masyarakat. Sehubungan dengan ini menjadi nyata vitalnya krida pemerintah sekarang guna menyehatkan dan membangun aparturnya menjadi aparaturnya pembangunan yang bersih dan berdedikasi. Niscaya *cepat atau lambat* tercapai Masyarakat Pancasila justru tergantung pada *kualitas aparaturnya pembangunan pemerintah yang sekarang* dalam meneladankan pembangunan kesejahteraan umum.

Maka dari itu diharapkan agar pemberantasan korupsi yang kini sedang berjalan dan mulai berhasil mengungkap penyelewengan di berbagai instansi seperti Direktorat Reboisasi, Departemen Sosial, Perum Astek, manipulasi pajak *semakin berdaya mampu* membongkar liku-liku dan jaringan penyelewengan yang telah mengakar selama tahunan. Lalu dari sini ditegakkan tertib hukum dengan sanksi-sanksi efektif sehingga tercipta *momentum dan iklim* yaitu orang takut atau malu korupsi dan peka untuk melaporkan ketidakberesan dalam aparaturnya pembangunan. Di samping itu pendayagunaan aparaturnya pembangunan yang telah diprogramkan sudah sewajarnya lebih gesit membenahi birokratisasi yang berbelit-belit dan semrawut. Sebagai salah satu contoh terlalu banyaknya instansi yang ikut campur dalam hal impor buku berarti pula banyak waktu dan uang para importir buku yang terbuang. Terlalu banyak meja yang harus dilalui seperti harus melalui instansi Departemen P dan K, Departemen Perdagangan, Kejaksaan Agung, Departemen

Keuangan, dan kabarnya Departemen Penerangan akan turut campur (khususnya impor majalah).¹

Akhir-akhir ini lembaga kejaksaan tampak menunjukkan fungsi dan prestasinya dalam pemerintahan dan bertekad mendayagunakan aparatur pembangunan. Cukup menonjol kegiatan kejaksaan dalam upaya membongkar manipulasi dan korupsi. Mengingat perekonomian negara yang kurang cerah sekarang ini, maka pembersihan oleh kejaksaan itu berarti mencegah meluasnya kebocoran anggaran dan ini merupakan langkah kejaksaan yang bertanggung jawab dalam menyiapkan pemerintahan bersih dalam Pelita IV, yang dirancang sebagai periode penyiapan kerangka tinggal landas. Sudah barang tentu gebrakan kejaksaan ini *harus diimbangi oleh lembaga penegak hukum yang lain*, agar mampu memperbaiki kehidupan negara sesuai asas negara hukum. Untuk itu merupakan tantangan berat bila benar pengamatan yang menilai bahwa sebagian kecil saja penegak hukum kita tidak dihindangi dekadensi moral.²

Menurut Ketua Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Albert Hasi-buan, masalah korupsi dan manipulasi amat erat kaitannya dengan birokrasi dan kekuasaan. Seseorang yang tidak berada dalam struktur itu lebih kecil kemungkinannya terlibat korupsi dan manipulasi. Dipandanginya langkah-langkah kejaksaan kini berhasil menembus struktur birokrasi, namun *belum berhasil menembus tembok-tembok kekuasaan*. Sebab itu rakyat mengharapkan kejaksaan juga menembus tembok tersebut dan menyeret para pelaku korupsi yang berlindung di balik kekuasaannya. Aparat penegak hukum ditegaskannya harus aktif mengikuti dinamika kejaksaan, sehingga semuanya berperan-serta secara seimbang. Sebab ternyata banyak kasus yang dibongkar oleh kejaksaan itu sebenarnya telah melalui proses pengawasan dan telah dinyatakan wajar oleh para pengawas. Artinya *beberapa lapis pengawasan tidak waspada mengamati kebocoran*, sementara kejaksaan berhasil membuktikannya.³

Bagaimanapun operasi hukum seharusnya dijadikan *gerakan penegakan hukum secara nasional* di dalam aparatur pembangunan dan tata masyarakat yang menipis jiwa sosialnya. Barulah dari sini ditumbuhkan lagi *kesadaran dan penghormatan hukum* dan dimungkinkan mengembangkan *kesadaran dan tanggung jawab sosial*. Adanya kesadaran dan tanggung jawab sosial merupakan prasyarat dipermudahnya *kebangkitan semangat nasional* untuk

¹Harian *Kompas*, 22 Juli 1983.

²Lihat Tajuk *Merdeka*, 23 Juli 1983.

³Harian *Kompas*, 22 Juli 1983.

menciptakan kesejahteraan umum di atas. Jelaslah bangkitnya semangat mau membangun kesejahteraan umum merupakan awal perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera. Berkat berkobar meluas dan menggeloranya semangat ini secara nasional (sebagaimana diteladankan oleh proses nasionalisme setelah Budi Utomo) niscaya dapat mempercepat dan memantapkan pembangunan maupun kemajuan bangsa; kita *dimampukan bekerja sama dan saling menunjang* bagi tercapainya Masyarakat Pancasila.

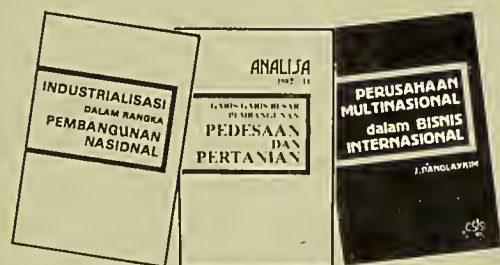
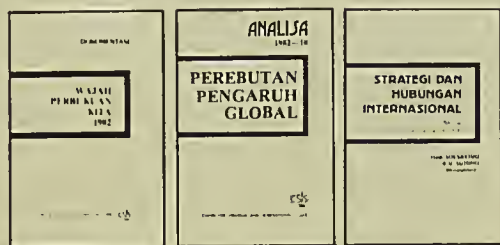
PENUTUP

Dari pengupasan kesejarahan bangsa Indonesia kita mengerti berbagai prestasi ulung generasi nenek moyang yang pernah dicapai baik dalam kebudayaan jasmaniah maupun kebudayaan rohaniah. Pengertian ini selayaknya menyadarkan kita, generasi anak cucunya untuk membuat kesejarahan selanjutnya sebagai *dinamika perkembangannya yang bermutu*. Secara konkrit, bila dahulu bangsa kita mempelajari kebudayaan lain atau memanfaatkan peluang internasional dan menggunakannya untuk menciptakan karya budaya baru yang gemilang dan orisinal, maka kini pun bangsa kita bisa dan wajib mempelajari peradaban mutakhir ini (seperti dicontohkan bangsa Jepang) serta menggunakannya untuk membangun masyarakat Pancasila sebagai *peradaban manusia menyeluruh dan utuh sampai kedalaman hati* dan bukan hanya *peradaban lahiriah dangkal* yang semu dan penuh kepalsuan.

Karya raksasa candi Borobudur atau gelora nasionalisme kemerdekaan yang membanggakan itu memang merupakan *hasil kerja kolektif* yang membutuhkan *partisipasi aktif, inisiatif, kreasi, dan sikap positif* dari rakyat. Terutama prestasi kreatifnya pastilah sebagai hasil atau ditunjang partisipasi aktif, positif, dan berinisiatif pada umumnya. Dalam membangun Masyarakat Pancasila yang jelas merupakan pembangunan bangsa besar, sudah barang tentu membutuhkan partisipasi demikian itu juga. Namun gerak pembangunan bangsa sekarang ini, partisipasi aktif dan positif dari masyarakat mengamanatkan *berkembangnya jiwa kedisiplinan, bertanggung jawab, dan korektif*. Pengembangan ini mempersyaratkan "merakyatnya pemerintah," yaitu *keterbukaan dan kemanunggalan* pemerintah dan rakyat dalam mengelola roda pembangunan bangsa.

Bangsa Indonesia yang telah mempunyai kesejarahan unik dan unggul baik masa lampau maupun cita-cita masa depannya itu memang tidak cukup hanya berbangga dan berpuas diri. Sebab kepuasan dan kebanggaan macam apa pun hampir tidak mempunyai arti, kalau generasi penerus yang sekarang ini dipercayakan untuk membuat kesejarahan bangsanya tidak secara kolektif

dan terpadu menyumbangkan partisipasi aktif, positif, berinisiatif, dan kreatif demi cita-cita Pancasila. Terwujudnya Masyarakat Pancasila ini akan diuji oleh *kemauan mereka untuk membangun kesejahteraan umum sesuai dengan kemampuan maksimalnya* dan bukan oleh prestasi berlomba membangun kesejahteraan jasmaniah secara serakah bagi dirinya sendiri. Tidak berhasilnya membangkitkan, mengobarkan, dan menggelorakan semangat nasional untuk membangun kesejahteraan umum berarti menggerogoti, melemahkan, serta memundurkan potensi bangsa dan menyalahgunakan potensi besarnya.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta 10160, Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35